

Dr. Syafruddin, M.Pd.

MEMBANGUN BAHASA SANTUN



MEMBANGUN BAHASA SANTUN

© Dr. Syafruddin, M.Pd. 2018

All rights reserved

vi + 112 hlm; 15,5 x 23,5 cm

Cetakan. 1 Januari 2018

ISBN: 978-602-50590-6-3

Penulis: Dr. Syafruddin, M.Pd.

Editor : Dr. Siti Suwadah Rimang, M.Hum.

Lay Out: LinkMed Pro

Desain Sampul: LinkMed Pro

Copyright © 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan Oleh:

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin nomor 259 Makassar

Telp 0411-866972

Kerjasama Dengan

Dialektika

Jl. Depokan II No 530 Peleman Rejowinangun

Kotagede Yogyakarta

Telp : (0274) 4436767, 0856 4345 5556

Email: mitradialektika@gmail.com

www.linkmedprojogja.com

PRAKATA

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah swt., atas rahmat dan lindungan-Nya sehingga Buku Teks dengan judul: “Membangun Bahasa Santun” dapat diselesaikan dengan baik. Pembahasan materi pada bahan ajar ini dilakukan dengan cara memaparkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian yang dilakukan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Isi buku teks ini mencakup materi pokok yang kami telah ramu dalam satu mata kuliah yang dapat saling melengkapi yakni tindak tutur, dan pragmatik. Bahan ajar ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur dibidang pengajaran dan penelitian dalam bidang Bahasa dan Humaniora.

Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan bahan ajar ini. Mudah-mudahan bahan ajar ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi para mahasiswa pada umumnya yang mengampu mata kuliah Sosiolinguistik dan Pragmatik. Bahan ajar ini disusun dengan tujuan menyediakan materi pembelajaran yang dapat menambah wawasan mahasiswa dan dosen.

Penyusunan buku teks ini terselesaikan atas dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Walaupun kami telah menyusun bahan ajar ini dengan upaya yang sungguh-sungguh, tentu masih memiliki sejumlah kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan

masuk dari berbagai pihak, terutama mahasiswa sebagai pengguna buku ini, untuk perbaikan lebih lanjut.

Makassar, 10 Nopember 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : KESANTUNAN BERBAHASA	1
A. Definisi Kesantunan.....	1
B. Kesantunan Berbahasa.....	2
C. Ciri Kesantunan Berbahasa.....	16
D. Bentuk dan Penyebab Ketidaksantunan	20
E. Kesantunan dan Kebudayaan	26
BAB II : PRINSIP KERJASAMA DAN MODEL KESANTUNAN	29
BAB III : TINDAK TUTUR SEBAGAI SALAH SATU	
ASPEK DALAM KESANTUNAN BERBAHASA	45
A. Pengertian Tindak Tutur	46
B. Tindak Tutur Austin	49
C. Tindak Tutur Searle	54
BAB IV : PERISTIWA TUTUR.....	61
A. Aspek–Aspek Situasi Tutur.....	62
B. Aspek Mitra Tutur dalam Tindak tutur	63
C. Aspek Kedekatan Hubungan.....	63
BAB V : PENDIDIKAN BAHASA SANTUN	65
A. Pendidikan Bahasa Santun	65
B. Peluang dan Tantangan Program Berbahasa Santun di Sekolah	74
C. Strategi Pendidikan dalam Pengembangan	

Bahasa Santun (Sofyan Sauri)	82
BAB VI : REPRESENTASI KESANTUNAN BERBAHASA	
 ANGGOTA LEGESLATIF PROVINSI SULAWESI SELATAN...	87
DAFTAR PUSTAKA.....	102
TENTANG PENULIS	111

BAB I

KESANTUNAN BERBAHASA

A. Definisi Kesantunan

Dalam KBBI edisi ketiga (1990) dijelaskan bahwa kesantunan adalah kehalusan dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya). Selain itu kesantunan (politeness), atau etiket adalah tatacara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan ini biasa disebut “tatakrama”.

Kesantunan bersifat relatif di dalam masyarakat. Ujaran tertentu bisa dikatakan santun di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, akan tetapi di kelompok masyarakat lain bisa dikatakan tidak santun. Menurut Zamzani, dkk. (2010:2) kesantunan (politeness) merupakan perilaku yang diekspresikan dengan cara yang baik atau beretika. Kesantunan merupakan fenomena kultural, sehingga apa yang dianggap santun oleh suatu kultur mungkin tidak demikian halnya dengan kultur yang lain. Tujuan kesantunan, termasuk kesantunan berbahasa, adalah membuat suasana berinteraksi menyenangkan, tidak mengancam muka dan efektif.

B. Kesantunan Berbahasa

Salah satu standar dalam bertingkah laku dalam norma sosial adalah berbicara santun. Di dalam agama Islam, Alquran menampilkan enam prinsip yang dapat dijadikan pegangan saat berbicara. Enam prinsip tersebut adalah, pertama, *qaulan sadida*, yaitu berbicara dengan benar; kedua, *qaulan ma'rufa*, yaitu berbicara menggunakan bahasa yang menyedapkan hati, tidak menyinggung atau menyakiti perasaan, sesuai dengan kriteria kebenaran, jujur, tidak mengandung kebohongan, dan tidak berpura-pura; ketiga, *qaulan baligha*, (Q.S. 4 An-Nisa: 8,9,63), yaitu berbicara efektif dengan menggunakan ungkapan yang mengena, mencapai sasaran dan tujuan, atau membekas, bicaranya jelas, terang, tepat; keempat, *qaulan maysura*, (Q.S.17 Al-Isra: 28), yaitu berbicara dengan baik dan pantas, agar orang tidak kecewa; Kelima, *qaulan karima*, (Q.S. 17 Al-Isra: 23), yaitu berbicara dengan kata-kata mulia yang menyiratkan kata yang isi, pesan, cara serta tujuannya selalu baik, terpuji, penuh hormat, mencerminkan akhlak terpuji dan mulia; keenam, *qaulan layyina*, (Q.S. 20 Thaha: 44), yaitu berbicara dengan lembut. Enam prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran di atas merupakan acuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita berkomunikasi. Hal ini, menurut Sauri sejalan dengan isyarat Nabi Muhammad SAW bahwa “Muslim yang baik adalah jika Muslim lain merasa tenteram dari perkataan dan perbuatannya”.

Kesantunan berbahasa juga merupakan salah satu nilai budaya yang sangat dijunjung tinggi di dalam masyarakat Indonesia. Nilai kesantunan bukan sesuatu yang dibawa lahir tetapi merupakan hasil proses sosialisasi dan konstruksi sosial budaya dan sejarah suatu bangsa. Kita tidak mungkin membayangkan sebuah masyarakat manusia yang tidak mendayagunakan strategi berkomunikasi untuk menghindari friksi interpersonal, menghindari konflik, meminimalkan pertentangan, serta untuk meningkatkan rasa nyaman dan saling pengertian. Selain itu, bentuk kesantunan tidak bersifat universal tetapi dibentuk oleh latar sosial sehingga bentuk

dan latar tidak boleh dipisahkan. Menurutnya ada tiga hal yang menentukan bentuk kesantunan yang dipilih yakni norma budaya, situasi, dan sifat pesan yang ingin disampaikan.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sering sekali membawa pergeseran dalam nilai budaya termasuk nilai kesantunan dalam berbahasa. Di dalam konteks Indonesia misalnya, seiring dengan proses demokratisasi dan reformasi yang sedang bergulir di Indonesia, perkembangan pers menunjukkan adanya perubahan watak dari pers yang semula amat santun menjadi pers bebas yang terampil memproduksi teks-teks kritis terhadap pemerintah ataupun sosok kekuasaan lain. Hal ini didukung Siregar di dalam Kompas yang menyatakan bahwa pemilihan kata-kata dalam pemberitaan media massa cenderung menurun kesantunannya dibanding sebelum reformasi. Kata-kata yang dipakai cenderung lugas untuk tidak menyebut sebagai kasar. Menurutnya hal ini sangat berbeda dengan zaman pemerintahan Soeharto. Pada masa itu pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya.

Asus menunjukkan seringnya terjadi perdebatan bahkan pertengkaran tentang suatu masalah dalam rapat dan diabaikannya sopan santun.

Selain itu, banyak kritik yang dilontarkan atas etika berbahasa anggota DPRD di dalam sidang sebagaimana yang dapat dicermati dari sejumlah pemberitaan di media massa. Sebagaimana ditulis pada surat kabar nasional misalnya, Rapat Paripurna DPR-RI yang membahas komposisi keanggotaan komisi-komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya pada tanggal 4 Nopember 2003 diwarnai kericuhan karena sejumlah anggota merasa tidak cukup dengan interupsi melainkan maju ke depan berteriak-teriak bahkan memukul-mukul meja.

Demikian juga rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pada 17 Februari 2005 diberitakan berlangsung ricuh

dipicu pertanyaan seorang anggota DPR, “Masih adakah kemampuan Bapak untuk menegakkan benang basah, sehingga tidak seperti Ustadz di kampung Watts menegaskan bahwa perilaku santun tidak sama dengan perilaku normatif. Kesantunan merupakan perilaku yang bersifat *surplus* yakni berada di atas tataran perilaku normatif. Dengan merujuk kepada pendapat ini, seseorang yang berperilaku santun dipastikan telah memenuhi kriteria berperilaku normatif. Sebaliknya seseorang yang berperilaku normatif belum tentu berperilaku santun. Oleh karena kesantunan sering dipandang sama dengan perilaku normatif, maka realisasi perilaku santun dianggap sebagai sesuatu yang sudah semestinya. Perhatian dan penghargaan terhadap perilaku santun menjadi sangat sedikit. Sebaliknya, pelanggaran terhadap perilaku normatif atau ketidaksantunan lebih cepat dikenali dan dibicarakan. Hal ini misalnya jelas terlihat di dalam fenomena rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang banyak disoroti akhir-akhir ini.

Dengan dihasilkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan dasar bagi peralihan sistem pemerintahan yang sentralistis menuju sistem pemerintahan yang desentralistis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lagi menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah namun merupakan Badan Legislatif Daerah. Kedudukannya dengan demikian sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Perubahan kedudukan DPRD ini membawa implikasi pada pemberian tugas dan kewenangan bagi DPRD dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah antara lain dalam kewenangan mengontrol Pemerintahan Daerah. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh Hadiati lembaga legislatif di daerah sering bertentangan dengan lembaga eksekutif. Banyak kasus menunjukkan seringnya terjadi perdebatan bahkan pertengkaran tentang suatu masalah dalam rapat dan diabaikannya sopan santun.

Selain itu, banyak kritik yang dilontarkan atas etika berbahasa anggota DPRD di dalam sidang sebagaimana yang dapat dicermati dari sejumlah pemberitaan di media massa. Sebagaimana ditulis pada surat kabar nasional misalnya, Rapat Paripurna DPR-RI yang membahas komposisi keanggotaan komisi-komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya pada tanggal 4 Nopember 2003 diwarnai kericuhan karena sejumlah anggota DPRD merasa tidak cukup puas dengan interupsi melainkan maju ke depan berteriak-teriak bahkan memukul-mukul meja.

Demikian juga dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pada 17 Februari 2005 diberitakan berlangsung ricuh dipicu pertanyaan seorang anggota DPR, “Masih adakah kemampuan Bapak untuk menegakkan benang basah, sehingga tidak seperti Ustadz di kampung maling”. Sebagaimana ditulis di Suara Merdeka, Abdul Rahman Saleh minta agar kalimat tersebut dicabut. Kejati Nanggroe Aceh Darussalam diberitakan berdiri dan mengebrak meja sambil mengatakan dengan nada tinggi, “Anggota DPR apa seperti ini. Kita ini rapat, bukan saling menghina, jangan seenaknya bicara”. Juga digambarkan bahwa situasi sempat tak terkendali selama 15 menit, apalagi anggota DPR dimaksud tak mau mencabut kalimat yang membuat ricuh tersebut. Akhirnya rapat selama 6 jam 20 menit untuk membicarakan pemberantasan korupsi itu ditutup dengan hasil nol besar.

Peristiwa di atas menunjukkan perhatian yang besar terhadap pelanggaran perilaku normatif di rapat DPRD. Hal yang sama yang terjadi pada sidang lanjutan membahas keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Gedung DPR/MPR Rabu 16 Maret 2005 yang diberitakan berlangsung ricuh karena perbedaan pendapat diselesaikan dengan kekuatan fisik, adu dorong, bukan dengan kekuatan nalar dan adu argumen (Pikiran Rakyat, 2005).

Sejumlah pesan *short message service* (SMS) yang berasal dari responden acara Bedah Editorial yang disiarkan pada hari

Sabtu, 04 Februari 2006 dengan judul “Etika Bicara di Parlemen” juga menunjukkan kritik yang sama. Hampir semua pesan SMS menyoroti gaya bicara anggota DPRD yang dinilai kurang santun. Pesan SMS tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. “*Saya sangat setuju anggota DPR yang tdk beretika dan ngomongnya arogan gaya preman kampung itu dipermak spt itu, biar taurasa dan beretika...!!*” (AJIEBogor 6281315073xxx);
2. “*DPR HRS akhiri premanisme dan belajar etika berbicara, kalau demokrasi hrs SANTUN dan bijaksana anda dipilih oleh rakyat dan hargai apa yg rakyat sdh percayakan.*” (62811489xxx);
3. “*Bicara boleh keras tapi harus santun bos.*” (6285241002xxx)
4. “*DPRJAGABICARADANETIKAMU, OKEY.*”(6281545994xxx);
5. “*Anggota DPR RI adalah ahli bicara menyampaikan pendapat tetapi tetap hrs punya etika krn etika itu adalah gambaran akhlak.*” (6281349593xxx);
6. “*Mentang2 anggota dewan ngomong seenaknya. Di pikir dong bos.*” (6281528248xxx);
7. “*Kalau bicara jangan hanya asal bunyi seperti kentut, yg santun ya dik.*”(628161857xxx);
8. “*Tolong di perbaiki tata krama di ruang parlemen. Selain bicara disaring, handphone di matikan, gaya duduk sopan & jangan tidur tiduran waktu sidang.*”(6281372195xxx);
9. “*Etika berbicara hrs diperhatikan jgn menimbulkan emosi org yg mendengarnya.*” (62811123xxx);
10. “*DPR PERLU DITATAR BERBAHASA LAGI, MASA KALAH OLEH ANAK TK.*” (628889201xxx);
11. “*Supaya anggota dewan kita introspeksi untuk lebih dewasa, bijaksana, dan santun erbicara.*” (62816901xxx);
12. “*Anggota DPR yth, kalau ngomong pake etika dan sopan jangan asbun.*” (6281318999xxx).

Sedikit Sekali pesan SMS yang membela gaya bicara anggota dewan sebagai berikut: ”DPR maju kena mundur kena. Bicara keras salah, bicara halus dikira lemah dan loyo...Ekskutif-Legslatif-Yudijatif semua sm sj gak ada yg baik dpt dicontohkan”

(62816937xxx); ”ETIKA KOMUNIKASI MEMANG PERLU, TETAPI YG PALING PERLU MAKSUD DAN ISI YG DIKOMUNIKASIKAN (6281524174xxx).”

Sejumlah faktor diasumsikan terkait dengan pemberitaan miring mengenai etika berbicara anggota DPRD. Secara keseluruhan persepsi masyarakat Indonesia mengenai sikap politisi memang belum baik. Penelitian Manurung (2000: 35-36) yang mengambil sampel di Kotamadia Medan mengenai persepsi mahasiswa terhadap politisi misalnya menunjukkan bahwa sikap politisi saat ini memang dinilai tidak positif. Hal ini sejalan dengan temuan yang digambarkan pada Hadiati bahwa kebijakan yang diambil Anggota DPRD adalah untuk kepentingan individu yang dibungkus seolah-olah untuk kepentingan rakyat. Hal ini lah yang kadang-kadang dinilai menjadi sumber kericuhan di dalam rapat DPRD. Padahal ukuran keberhasilan demokrasi, menurut Koiruddin bisa dilihat dalam kerangka apakah aspirasi konstituen sebagaimana yang dicerminkan dalam janji-janji politik partai terwujud dalam implementasinya.

Faktor lain adalah sebagaimana dikemukakan Hadiati yang mengidentifikasi sejumlah kelemahan berbahasa dalam rapat DPRD diantaranya adalah: tidak mampu mengemukakan argumen; belum bisa menerima masukan, kritik dan saran dari pihak luar; kemampuan komunikasinya lemah, apabila bicara atau memberi pandangan justru membingungkan; sering terjadi perdebatan bahkan pertengkaran tentang suatu masalah dalam rapat komisi.

Sejumlah hal yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa lembaga itu seolah-olah hanya menampilkan ketidaksantunan berbahasa. Padahal kesan yang tertangkap itu dikarenakan ketidaksantunan sebagai pelanggaran perilaku normatif lebih

mudah dikenali. Bila dibandingkan dengan keadaan yang terjadi di negara lain seperti di Amerika Serikat misalnya hal yang sama juga pernah menjadi keprihatinan kaum intelektual. Uslaner, (1993) menggambarkan bagaimana menurunnya praktik kesantunan berbahasa di Kongres Amerika Serikat. Dia mengatakan Kongres Amerika dulunya adalah tempat yang menyenangkan yakni ketika kesopanan dan sikap saling menghargai merupakan hal-hal yang diutamakan di dalam tingkah laku anggota Kongres. Menurutnya, hal tersebut merupakan gambaran mengenai menurunnya sikap hormat di negara tersebut. Pernyataan ini saat itu dipandang sangat kontroversial oleh berbagai kalangan.

Demikian juga Cipto, (1995) dengan merujuk kepada tindak kekerasan yang pernah terjadi di Kongres Amerika dan Parlemen Taiwan, dia menyimpulkan bahwa isu pengendalian dan pengawasan perdebatan di parlemen ternyata bukan hal yang sepele. Dia menggambarkan, secara ideal, dalam perdebatan seorang anggota parlemen sebaiknya menghindari sejauh mungkin kata-kata atau pernyataan-pernyataan yang merusak hubungan pribadi dengan anggota parlemen lainnya.

Semua fenomena mengenai rapat Dewan Perwakilan Rakyat di atas dan rapat parlemen di Negara lain jelas menunjukkan kepada kita bahwa pelanggaran perilaku normatif atau yang disebut dengan ketidaksantunan lebih cepat disadari. Dalam konteks Indonesia, kenyataan sesungguhnya menunjukkan bahwa tidak semua rapat DPR berlangsung ricuh. Walaupun rapat DPRD adalah sebuah *genre* pengancaman muka, kebanyakan rapat DPR berlangsung mulus. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan kriteria perilaku normatif di rapat DPRD lebih umum terjadi dibanding pelanggarannya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah hanya pemenuhan perilaku normatif saja yang terjadi di rapat DPRD? Adakah upaya anggota DPRD untuk merealisasi perilaku santun yakni perilaku yang menampilkan mutu ujaran yang lebih tinggi dari sekedar mutu ujaran perilaku normatif?

Realisasi kesantunan berbahasa dalam salah satu lembaga nasional yang paling mewakili semangat reformasi yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penting untuk dikaji sedikitnya karena dua alasan: pertama, karena dapat merefleksikan cara-cara sebagian orang Indonesia bertutur satu sama lain; kedua, karena dapat merefleksikan perkembangan sosial politik yang ada. Pada zaman Orde Baru, strategi kesantunan Budaya Jawa cenderung dijadikan sebagai model strategi kesantunan berbahasa dalam tataran kehidupan politik dan sosial secara nasional yang ditandai dengan ketidaklangsungan ujaran. Di zaman reformasi, kebebasan memberikan pendapat secara lugas dipandang sebagai cara baru memaknai demokrasi.

Kesantunan berbahasa di rapat DPRD sesungguhnya merupakan sebuah hal yang pasti ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Goody yang menyatakan bahwa di mana saja di dunia ini, setiap orang ingin mengamankan kerjasamanya dengan orang lain. Untuk itu, dia harus menghindari diri dari bersikap menentang orang lain atau dalam istilah Brown dan Levinson menghindari mengancam muka orang lain. Kesantunan merupakan sistim hubungan interpersonal yang dapat memfasilitasi kebutuhan untuk menghindari atau mengurangi ancaman muka dimaksud. Namun sebagaimana ditegaskan terdahulu, kesantunan sering dianggap sebagai perilaku normatif sehingga pelanggarananya lebih mudah terlihat. Selain itu, karena perilaku normatif dan perilaku santun dianggap identik, perhatian terhadap kesantunan sebagai sebuah perilaku *surplus* sering diabaikan.

Dalam setiap kelompok budaya berbeda, definisi dan realisasi kesantunan juga berbeda. Namun menurut Watts, ada bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang diklasifikasikan sebagai kerjasama dalam interaksi sosial dan sikap mempertimbangkan orang lain. Walaupun diakui bahwa tidak semua interaksi sosial bertujuan untuk membina kerjasama seperti perdebatan politik, diskusi tentang isu-isu yang bersifat kontroversial, pertengkaran karena mempertahankan hak

dan kepemilikan, dan sejenisnya yang merupakan contoh-contoh konfrontasi dan kompetisi, bukan kolaborasi dan kerjasama yang diutamakan. Bila dikaitkan dengan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perdebatan bukan saja merupakan sesuatu yang diharapkan tetapi juga dihargai. Sifat kompetitif ujaran yang bersifat dominan dalam mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat tidak serta merta dapat dijadikan kesimpulan bahwa perilaku santun ditiadakan. Hal ini disebabkan antara lain bahwa pemenuhan perilaku normatif dalam rapat DPRD diatur dalam pasal 65 yakni, berkewajiban menaati kode etik dan Peraturan tata Tertib DPRD, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait. Ini sekaligus bermakna bahwa perilaku santun potensial keberadaanya di rapat DPRD.

Hal ini telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya di rapat parlemen Inggris. Merujuk kepada temuan penelitian yang dilakukan pada Parlemen Inggris, Christie menyatakan bahwa perdebatan pada rapat parlemen merupakan genre pengancam muka, yang tidak dirancang untuk menghindari atau mengurangi konflik, temuan penelitian menunjukkan bahwa ujaran yang bersifat mengancam muka di parlemen tidak selamanya mengancam jalannya rapat. Sering sekali yang terjadi adalah sebaliknya, perdebatan justru memaksimalkan jalannya rapat. Demikian juga halnya di dalam rapat DPRD, tidak semua rapat berjalan kisruh dan ricuh walau di dalamnya terjadi perdebatan. Perdebatan sedemikian ini diasumsikan merealisasi perilaku lazim bahkan mungkin perilaku santun di dalamnya.

Kesantunan berbahasa anggota DPRD menarik untuk dikaji karena berbagai alasan. Pertama, kesantunan berbahasa merupakan salah satu nilai yang sangat diyakini oleh masyarakat Indonesia dan juga merupakan salah satu ikon yang dikenal secara luas tentang Indonesia di dunia internasional. Secara internal, nilai budaya 'sopan santun' dan 'tatakrama' banyak diinspirasi oleh Al

Qur'an sebagaimana yang dikemukakan di awal yang diajarkan turun temurun dari generasi ke generasi. Secara eksternal, nilai budaya ini juga dijadikan nilai identitas diri sebagai rujukan untuk pengenalan diri. Ruth Willner pada Drake menulis bahwa Indonesia dikenal dengan nilai-nilai: saling ketergantungan dan gotong royong, mencapai keputusan melalui musyawarah dan mufakat, meyakini perlunya mengontrol emosi dan menyelamatkan muka, menyesuaikan diri dengan norma-norma dan harapan kelompok, dan menekankan pentingnya menjaga harmoni dan persatuan. Dengan kata lain, nilai perlunya mengontrol emosi dan menyelamatkan muka yang merupakan bagian dari kesantunan berbahasa merupakan nilai-nilai yang kepentingannya sejajar dengan nilai musyawarah mufakat dan realisasi kedua nilai ditemukan dalam rapat DPRD. Oleh karenanya, interaksi antara kedua nilai dalam mengakomodasi pencapaian tujuan demokrasi di dalam persidangan penting dan menarik untuk dikaji. Hal ini sekaligus akan menerangkan secara akademis fenomena kericuhan sidang yang terjadi sebagaimana digambarkan pada media di atas.

Kedua, sebagaimana dinyatakan Sibarani fenomena kesantunan berbahasa penting diperbincangkan di Indonesia yang sedang mengalami proses reformasi telah bergeser atau tidak dihiraukan lagi. Selain itu kesantunan berbahasa dianggap sebagai warisan budaya feodal yang menghambat kebebasan berpikir, dan kesantunan berbahasa sering disalah tafsirkan menjadi terlalu eufemistis sehingga dapat digunakan pejabat untuk membohongi rakyat. Sementara di sisi lain masih berlaku anggapan bahwa kesantunan berbahasa sangat diperlukan di dalam berkomunikasi dengan sejumlah alasan pula, yakni: 1) kesopansantunan seseorang dinilai dari bahasanya yang santun atau dari 'budi bahasanya'; 2) bahasa yang santun akan memperlancar penyampaian pesan dalam berkomunikasi; dan 3) bahasa yang kurang santun sering menyakitkan perasan orang lain sehingga tidak jarang menjadi sumber konflik.

Ketiga, adanya pergeseran mengenai konsep musyawarah dan mufakat di dalam masyarakat Indonesia sejak berakhirnya orde baru. Pergeseran konsep musyawarah mufakat diperkirakan juga menggeser konsep mengenai kesantunan berbahasa di dalam rapat-rapat DPRD. Konsep bermusawarah dan bermufakat dalam pengambilan keputusan merupakan sebuah format kesantunan yang pernah sangat dibanggakan. Bahkan, dengan mengutip pendapat mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto, musyawarah mufakat dianggap sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia yang khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa Barat. Pengambilan keputusan dengan cara *voting* bukan saja dianggap tidak sesuai dengan tradisi bangsa Indonesia tetapi juga akan menciptakan sikap tersinggung, marah, dan sakit hati pada pihak yang kalah. Namun sejauh pengamatan Kuipers, konsep musyawarah mufakat baik dalam masyarakat kampung maupun dunia politik Indonesia sesungguhnya tidak pernah terjadi dalam tataran praktis empiris tetapi hanya ada dalam tataran ideologi dan citacita. Menurutnya, yang sesungguhnya terjadi adalah sebagian kecil orang mengambil keputusan dan sebagian besar lainnya tinggal menyetujui. Dia juga menyatakan, sejak runtuhnya orde baru konsep musyawarah mufakat versi orde baru semakin tidak menemukan realisasinya lagi yang dibuktikan dengan proses pengangkatan Habibie menggantikan Soeharto yang menurut Kuipers adalah sebuah penyelaan (*interruptions*) yang merupakan gaya berinteraksi dan strategi bermusyawarah masyarakat Barat. Konsep musyawarah dan mufakat yang telah bergeser sejak era reformasi ini mungkin saja memberi dampak pada terbentuknya cara-cara berkomunikasi yang baru yang dapat saja memberi makna baru pula terhadap konsep kesantunan berbahasa antara lain yang dilakukan di rapat DPRD.

Keempat, kesantunan berbahasa merupakan sebuah sistem dan realisasinya berlaku secara khas dalam sebuah masyarakat praktisi tertentu. Dengan istilah ini, anggota masyarakat praktisilah yang

memutuskan apakah sebuah unsur bahasa tertentu santun atau tidak (Mills, 2003: 9). Dengan pernyataan ini, disadari adanya gejala penolakan secara luas terhadap konsep keuniversalan kesantunan sebagaimana yang dikemukakan Brown dan Levinson. Pendapat Mills ini menyatakan bahwa apa yang dianggap tidak santun oleh masyarakat praktisi tertentu dapat saja masih dianggap santun dan berterima di dalam masyarakat praktisi lainnya dan sebaliknya. Interupsi misalnya merupakan sesuatu hal yang lumrah di dalam rapat DPRD namun sedikit sekali dilakukan di dalam rapat akademis atau birokratik.

Alasan lain adalah bahwa penelitian kesantunan dalam berbagai profesi akan memberi wawasan mengenai perlunya meningkatkan mutu interaksi.

Sebagaimana terlihat pada tata tertib yang mengatur fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, ada dua faktor yang secara dinamis tarik menarik di antara kedua lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah, yakni faktor kemitrasejajaran di satu sisi dan fungsi DPRD mengawasi jalannya pembangunan di sisi lain. Faktor kemitrasejajaran mempersyaratkan kolaborasi dan kooperasi sementara faktor pengawasan mempersyaratkan distansi dan kompetisi. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana sebuah sidang dapat berjalan dalam hubungan tarik menarik di antara faktor kolaborasi dan kompetisi ini dengan asumsi bahwa kesantunan berbahasa menjadi kendali yang menyeimbangkan keduanya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, paling tidak ada dua jenis tindak tutur yang dominan digunakan di dalam rapat DPRD yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketiga fungsi dimaksud dan yang dianggap potensial mengancam muka yakni tindak tutur meminta penjelasan dan tindak tutur memberikan pendapat. Reiter menyatakan bahwa tindak tutur meminta (dalam konteks rapat DPRD tindak tutur memberikan pendapat juga dipandang memiliki sifat yang sama) memiliki sifat menekan

petutur sehingga selalu ada kebutuhan untuk menggunakan strategi kesantunan.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan sumber daya linguistik apa saja yang digunakan anggota DPRD agar mengurangi tekanan pada lawan bicara atau untuk mengurangi ancaman muka ujaran dan menerangkan apakah sumber daya linguistik dimaksud terbuka terhadap interpretasi perilaku santun atau hanya merupakan perilaku normatif saja. Berbicara tidak selamanya berkaitan dengan masalah yang bersifat tekstual, tetapi seringkali pula berhubungan dengan persoalan yang bersifat interpersonal. Apabila sebagai retorika tekstual, pragmatik membutuhkan prinsip kerja sama maka dalam retorika interpersonal, pragmatik membutuhkan prinsip kesantunan bahasa.

Kesantunan dalam berbahasa merupakan bidang baru dalam kajian kebahasaan, khususnya bahasa dalam penggunaan (*language in use*), kesantunan (*politeness*) dalam berbahasa seyogyanya mendapatkan perhatian, baik oleh pakar atau linguis, maupun para pembelajar bahasa. Selain itu, penting juga bagi setiap orang untuk memahami kesantunan bahasa, karena manusia yang kodratnya adalah “makhluk berbahasa” senantiasa melakukan komunikasi verbal yang sudah sepatutnya beretika.

Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek kebahasaan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional penuturnya karena didalam terdapat komunikasi, penutur dan petutur tidak hanya dituntut menyampaikan kebenaran, tetapi harus tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan. Kesantunan berbahasa tercermin dalam tatacara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Menurut Rahardi (2005: 35) penelitian kesantunan mengkaji penggunaan bahasa (*language use*) dalam suatu masyarakat bahasa tertentu. Masyarakat tutur yang dimaksud adalah masyarakat dengan aneka latar belakang situasi sosial dan budaya yang mewadahnya. Adapun yang dikaji di dalam penelitian kesantunan adalah segi maksud dan fungsi tuturan. Fraser (melalui

Rahardi, 2005: 38-40) menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat empat pandangan yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah kesantunan dalam bertutur.

1. Pandangan kesantunan yang berkaitan dengan norma-norma sosial (the social-norm view). Dalam pandangan ini, kesantunan dalam bertutur ditentukan berdasarkan norma-norma sosial dan kultural yang ada dan berlaku di dalam masyarakat bahasa itu. Santun dalam bertutur ini disejajarkan dengan etiket berbahasa (language etiquette/Tindakan bertutur).
2. Pandangan yang melihat kesantunan sebagai sebuah maksim percakapan (conversational maxim) dan sebagai sebuah upaya penyelamatan muka (facesaving). Pandangan kesantunan sebagai maksim percakapan menganggap prinsip kesantunan (politeness principle) hanyalah sebagai pelengkap prinsip kerja sama (cooperative principle).
3. Pandangan ini melihat kesantunan sebagai tindakan untuk memenuhi persyaratan terpenuhinya sebuah kontrak percakapan (conversational contract). Jadi, bertindak santun itu sejajar dengan bertutur yang penuh pertimbangan etiket berbahasa.
4. Pandangan kesantunan yang keempat berkaitan dengan penelitian sosiolinguistik. Dalam pandangan ini, kesantunan dipandang sebagai sebuah indeks sosial (social indexing). Indeks sosial yang demikian terdapat dalam bentuk-bentuk referensi sosial (social reference), honorific (honorific), dan gaya bicara (style of speaking) (Rahardi, 2005: 40). Menurut Chaer (2010: 10) secara singkat dan umum ada tiga kaidah yang harus dipatuhi agar tuturan kita terdengar santun oleh pendengar atau lawan tutur kita. Ketiga kaidah itu adalah (1) formalitas (formality), (2) ketidaktegangan (hesitancy), dan (3) kesamaan atau kesekawanan (equality or camaraderie). Jadi, menurut Chaer (2010: 11) dengan singkat bisa dikatakan bahwa sebuah tuturan disebut santun kalau ia tidak terdengar memaksa atau

angkuh, tuturan itu memberi pilihan tindakan kepada lawan tutur, dan lawan tutur itu menjadi senang.

Kesantunan berbahasa tercermin dalam tatacara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tatacara berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita pikirkan. Tatacara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Apabila tatacara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif, misalnya dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradat, bahkan tidak berbudaya. Kesantunan berbahasa dapat dilakukan dengan cara pelaku tutur mematuhi prinsip sopan santun berbahasa yang berlaku di masyarakat pemakai bahasa itu. Jadi, diharapkan pelaku tutur dalam bertutur dengan mitra tuturnya untuk tidak mengabaikan prinsip sopan santun. Hal ini untuk menjaga hubungan baik dengan mitra tuturnya.

C. Ciri Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa seseorang, dapat diukur dengan beberapa jenis skala kesantunan. Chaer (2010: 63) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan skala kesantunan adalah peringkat kesantunan, mulai dari yang tidak santun sampai dengan yang paling santun. Rahardi (2005: 66-67) menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat tiga macam skala pengukur peringkat kesantunan yang sampai saat ini banyak digunakan sebagai dasar acuan dalam penelitian kesantunan.

Dalam model kesantunan Leech, setiap maksimum interpersonal itu dapat dimanfaatkan untuk menentukan peringkat kesantunan sebuah tuturan. Rahardi (2005: 66) menyatakan bahwa skala kesantunan Leech dibagi menjadi lima antara lain:

1. Cost benefit scale atau skala kerugian dan keuntungan, menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan

yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan. Semakin tuturan tersebut merugikan diri penutur, akan semakin dianggap santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tuturan itu menguntungkan diri penutur akan semakin dianggap tidak santunlah tuturan itu (Rahardi, 2005: 67).

2. Optionality scale atau skala pilihan, menunjuk kepada banyak atau sedikitnya pilihan (options) yang disampaikan si penutur kepada si mitra tutur di dalam kegiatan bertutur. Semakin pertuturan itu memungkinkan penutur atau mitra tutur menentukan pilihan yang banyak dan leluasa, akan dianggap semakin santunlah tuturan itu. Sebaliknya, apabila pertuturan itu sama sekali tidak memberikan kemungkinan memilih bagi si penutur dan si mitra tutur, tuturan tersebut dianggap tidak santun (Rahardi, 2005: 67).
3. Indirectness scale atau skala ketidaklangsungan menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan. Semakin tuturan itu bersifat langsung akan dianggap semakin tidak santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tidak langsung, maksud sebuah tuturan, akan dianggap semakin santunlah tuturan itu (Rahardi, 2005: 67).
4. Authority scale atau skala keotoritasan menunjuk kepada hubungan status sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam pertuturan. Semakin jauh jarak peringkat sosial (rank rating) antara penutur dan dengan mitra tutur, tuturan yang digunakan akan cenderung menjadi semakin santun. Sebaliknya, semakin dekat jarak peringkat status sosial di antara keduanya, akan cenderung berkurangnya peringkat kesantunan tuturan yang digunakan dalam bertutur itu (Rahardi, 2005: 67).
5. Social distance scale atau skala jarak sosial menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang

terlibat dalam sebuah pertuturan. Ada kecenderungan bahwa semakin dekat jarak peringkat sosial di antara keduanya, akan menjadi semakin kurang santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur dengan mitra tutur, akan semakin santunlah tuturan yang digunakan itu (Rahardi, 2005: 67).

Berdasarkan keenam maksim kesantunan yang dike- mukakan Leech (1993:206), Chaer (2010: 56-57) memberikan ciri kesantunan sebuah tuturan sebagai berikut:

1. Semakin panjang tuturan seseorang semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap santun kepada lawan tuturnya.
2. Tuturan yang diutarakan secara tidak langsung, lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung.
3. Memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah (imperatif).

Zamzani, dkk. (2010:20) merumuskan beberapa ciri tuturan yang baik berdasarkan prinsip kesantunan Leech, yakni sebagai berikut.

1. Tuturan yang menguntungkan orang lain
2. Tuturan yang meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri.
3. Tuturan yang menghormati orang lain
4. Tuturan yang merendahkan hati sendiri
5. Tuturan yang memaksimalkan kecocokan tuturan dengan orang lain
6. Tuturan yang memaksimalkan rasa simpati pada orang lain

Dalam sebuah tuturan juga diperlukan indikator-indikator untuk mengukur kesantunan sebuah tuturan, khususnya diksi. Pranowo (2009: 104) memberikan saran agar tuturan dapat mencerminkan rasa santun, yakni sebagai berikut.

1. Gunakan kata “tolong” untuk meminta bantuan pada orang lain.
2. Gunakan kata “maaf” untuk tuturan yang diperkirakan akan menyinggung perasaan lain.
3. Gunakan kata “terima kasih” sebagai penghormatan atas kebaikan orang lain.
4. Gunakan kata “berkenan” untuk meminta kesediaan orang lain melakukan sesuatu.
5. Gunakan kata “beliau” untuk menyebut orang ketiga yang dihormati.
6. Gunakan kata “bapak/ibu” untuk menyapa orang ketiga.

Implementasi indikator kesantunan dalam berkomunikasi digunakan agar kegiatan berbahasa dapat mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, Pranowo (2009: 110) menguraikan hal-hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi dapat berhasil, yakni sebagai berikut.

1. Perhatikan situasinya.
2. Perhatikan mitra tuturnya.
3. Perhatikan pesan yang disampaikan.
4. Perhatikan tujuan yang hendak dicapai.
5. Perhatikan cara menyampaikan.
6. Perhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.
7. Perhatikan ragam bahasa yang digunakan.
8. Perhatikan relevansi tuturannya.
9. Jagalah martabat atau perasaan mitra tutur.
10. Hindari hal-hal yang kurang baik bagi mitra tutur (konfrontasi dengan mitra tutur).
11. Hindari pujian untuk diri sendiri.
12. Berikan keuntungan pada mitra tutur.
13. Berikan pujian pada mitra tutur.

14. Ungkapkan rasa simpati pada mitra tutur.
15. Ungkapkan hal-hal yang membuat mitra tutur menjadi senang.
16. Buatlah kesepahaman dengan mitra tutur.

D. Bentuk dan Penyebab Ketidaksantunan

1. Bentuk Tuturan Tidak Santun

Dari tuturan-tuturan yang melanggar kaidah keantunan bahasa yang telah diuraikan diatas, tidak semua tuturan adalah tuturan yang tidak santun. Meskipun melanggar kaidah kesantunan yang telah ditentukan pada ahli, beberapa tuturan responden masih berkategori santun. Tuturan yang tidak santun dapat terjadi karena beberapa sebab. Tuturan berikut adalah tuturan yang tidak santun karena menyombongkan diri sendiri.

- (1) Kepastian itu milik Tuhan. Tugas kami mengikhtiarkan sehebat-hebatnya pemihakkan terhadap rakyat. Tugas kami menerangkan kepada rakyat bahwa kami bekerja tulus untuk mereka. Bahwa nanti akan takdir mengatakan itu turun dari ikhtiar kita sebagai bangsa, tanpa seorangpun berhak mengklaim sebagai diri sendiri bahwa ia yang berhasil untuk itu. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada beberapa komentar ini yang seolah-olah adalah perang antara PDIP dan Demokrat.. akhirnya penentunya Golkar juga to...? (Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Golkar, *Today's Dialogue*, 27 Januari 2009).
- (2) Jadi saya caleg ini karena saya didesak sama teman-teman karena memang saya ketua AAorganisasi dan juga Pembina pedagang kecil, tukang ojeg, bajaj, termasuk penyandang cacat. Jadi mereka bilang “kalau abang enggak maju, mungkin sekarang bisa tolong 10 orang, mungkin kalo misalnya jadi, bisa tolong ribuan orang.” Jadi saya tidak terlalu banyak bikin atribut, memang saya sangat efisien dan masyarakat mungkin

di Jakarta mereka sudah tahu siapa saya (Silvester Matutina, Caleg PDP, *Today's Dialogue*, 17 februari 2009).

- (3) Kalo misalnya jadi, bisa tolong ribuan orang.“ Jadi saya tidak terlalu banyak bikin atribut, memang saya sangat efisien dan masyarakat mungkin di Jakarta mereka sudah tahu siapa saya. (Silvester Matutina, Caleg PDP, *Today's Dialogue*, 17 Februari 2009) Tuturan (1) dan (2) merupakan tuturan yang tidak santung karena responden menyombongkan diri sendiri. Responden tidak bertutur dengan kerendahan hati justru berbangga diri. Dengan demikian dia melanggar maksim kerendahan hati. Sedangkan pada tuturan (3), (4) responden merendahkan orang lain. Tuturan yang merendahkan berpotensi menyinggung mitra tutur. Penghargaan pada mitra tutur dapat ditunjukkan dengan menunjukkan simpati pada usaha yang dilakukan oleh mitra tutur.
- (4) Sebelum diperiksa oleh posisi, datang ke Pak Taufik Kiemas beliau ini. Penting sekali ya dalam hubungan-hubungan politik marilah kita bersaing. bersainglah yang sehat dari dulu ibi Mega mengatakan, siapa yang mau maju, majulah. Mau yang kecil, yang sedang, yang besar, yang lama, yang baru, silakan maju saja. Mari kita beradu program, yakinkan rakyat dengan visi, misi ekonomi priskop masing-masing, begitu lebih terhormat dari pada kita bicara dalam forum (Maruarar sirait, Ketua DPP PDIP, *Today's Dialogue*, 4 Maret 2009).
- (5) Inikan bagaimana usaha, tapi usaha (Rizal Ramli) itu bisa gagal. Kita menghormati usahanya tapi kita tau dalam hati kecil dan tidak perlu disebutkan bagaimana (Muruarar Sirait, Ketua DPP PDIP, *Today's Dialogue*, 4 Maret 2009).

Pada tuturan (5), responden melakukan sebaliknya dengan menuturkan hal yang tidak menunjukkan simpati atas usaha mitra tutur. Ketika seseorang melakukan suatu usaha, tentunya ia akan mengharapkan dukungan bukan celaan. Dukungan yang diberikan merupakan bentuk simpati dan penghargaan atas usaha seseorang.

Oleh karena itu, apabila seorang penutur tidak menunjukkan simpati atas usaha mitra tuturnya, ia telah bersikap tidak santun.

Dengan menunjukkan ketidaksepakatan dengan mitra tutur secara langsung juga merupakan bentuk ketidaksantunan. Ketidaksepakan akan membuat mitra tutur merasa tidak dihargai. Pada penelitian ini, tuturan yang tidak santun karena minimnya kesepakatan antara penutur dengan mitra tutur ditunjukkan pada tuturan (6) dan (7).

- (6) Inilah bedanya Pak SBY Bu Mega. Jadi sekarang Pak SBY sebagai presiden itu sudah punya wapres. Kalau Bu Mega sebagai bakal capres masih mencari bakal cawapres. Itu bedahnya. Karena itu dalam konteks bakal cawapres kami tidak belanja seperti PDIP banyak nama disimulasi. Kami tidak disumulasi. Kami ingin bahwa SBY-JK ini menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Baru nanti setelah pemilu legislatif kami bicara tentang bakal cawapres (Anas Urbaningrum, Ketua DPP Partai Demokrat, *Today's Dialogue*, 24 Februari 2009).
- (7) Karena merokok itu masih diperdebatkan para ulama maka tidak otomatis begitu orang merokok itu langsung berdosa. Nah itu harus dilihat karena domain yang bisa diperselisihkan para ulama yang satu dengan ulama yang yang lain. Misalnya ibu hamil yang merokok tidak berdosa tapi tidak sehat untuk dirinya. Itu dari segi medis lebih efek dijelaskan ketimbang segala persoalan harus diintervensi dari sudut agama (Donmalik, Caleg PKB, Sekjen GP Anshor, *Today's Dialogue*, 4 Februari 2009).

Kritik dan perbedaan pendapat yang disampaikan secara langsung juga dapat menimbulkan gesekan interpersonal maka dapat menjadi tuturan yang tidak santun. Contohnya pada tuturan (8), (9), dan (10). Responden menuturkan secara langsung perbedaan dengan mitra tutur.

- (8) Saya kira jangan pilih 4L, “Lu Lagi Lu Lagi” karena hasilnya pasti nol. (Rizal ramli, calon President Blok Perubahan, *Today's Dialogue*, 4 Maret 2009) .
- (9) Bang Rizal saya harapkan berusahalah yang keras, karena kalau bang Rizal suaranya tinggi Bu Mega akan melirik. Tapi saya yakin dengan cara menyampaikan pendapat seperti itu agak sulit, baru mendapat suara tinggi apalagi dari loyalis-loyalis Ibu Mega (Marwarrar Siraid, Ketua DPP PDIP, *Todaoy's Dialogue*, 4 Marte 2009).
- (10) Ada yang meragukan tapi yang meragukan itu saya tentang untuk memberikan buktinya bahwa anda layak untuk diragukan dengan cara yang benar tapi kalau anda hanya mengigau, ini bukan tempatnya untuk mengigau (Hidayat Nurwahid, Majelis Dewan syuro, Ketua MPR, *save Our Nation*, 14 Januari 2009).

Berikut ini adalah contoh lain tuturan yang tidak santun yang mengandung kritik secara langsung.

- (11) Saya miris dan prihatin dengan isu muraha kampanye begitu ya. Isu ini saya kira memang isu. Kalau memang benar mau menyatkan peringatan, kita sudah tau TNI dan POLRI sudah seharusnya menurut peraturan undang-undang memang netral. Tapi kalau memang benar mau mengingatkan ada motivasi kampanye atau apa mengingatkan saja saya minta TNI dan POLRI menjaga betul betul, tidak boleh ada keberpihakan (Fuad Bawasir, Fungsionaris Partai Hanura, *Today's Dialogue*, 10 Februari 2009).

Dalam tuturan tersebut, responden mengkritik secara langsung pernyataan presiden meperingatkan TNI dan POLRI untuk bersikap netral saat pemilu dan kaitannya dengan isu ABS (Asal Bukan Capres S). Secara langsung, responden mengkritik presiden iya mengatakan bahwa pernyataan presiden adalah sebuah isu murahan yang membuatnya miris. Tuturan tersebut dapat menyinggung mitra

tuturnya sehingga berpotensi merusak hubungan interpersonal. Oleh karena itu tuturan di atas termasuk tuturan yang tidak santun.

2. Penyebab Ketidaksantunan

Pranowo (melalui Chaer, 2010: 69) menyatakan bahwa ada beberapa factor atau hal yang menyebabkan sebuah pertuturan itu menjadi tidak santun. Penyebab ketidaksantunan itu antara lain.

1. Kritik secara langsung dengan kata-kata kasar

Menurut Chaer (2010: 70) kritik kepada lawan tutur secara langsung dan dengan menggunakan kata-kata kasar akan menyebabkan sebuah pertuturan menjadi tidak santun atau jauh dari peringkat kesantunan. Dengan memberikan kritik secara langsung dan menggunakan kata-kata yang kasar tersebut dapat menyinggung perasaan lawan tutur, sehingga dinilai tidak santun.

contoh: Pemerintah memang tidak pecus mengelola uang. Mereka bisanya hanya mengkorupsi uang rakyat saja.

Tuturan di atas jelas menyinggung perasaan lawan tutur. Kalimat di atas terasa tidak santun karena penutur menyatakan kritik secara langsung dan menggunakan kata-kata yang kasar.

2. Dorongan rasa emosi penutur

Chaer (2010: 70) mengungkapkan, kadang kala ketika bertutur dorongan rasa emosi penutur begitu berlebihan sehingga ada kesan bahwa penutur marah kepada lawan tuturnya. Tuturan yang diungkapkan dengan rasa emosi oleh penuturnya akan dianggap menjadi tuturan yang tidak santun.

contoh: Apa buktinya kalau pendapat anda benar? Jelas-jelas jawaban anda tidak masuk akal.

Tuturan di atas terkesan dilakukan secara emosional dan kemarahan. Pada tuturan tersebut terkesan bahwa penutur tetap berpegang teguh pada pendapatnya, dan tidak mau menghargai pendapat orang lain.

3. Protektif terhadap pendapat

Menurut Chaer (2010: 71), seringkali ketika bertutur seorang penutur bersifat protektif terhadap pendapatnya. Hal ini dilakukan agar tuturan lawan tutur tidak dipercaya oleh pihak lain. Penutur ingin memperlihatkan pada orang lain bahwa pendapatnya benar, sedangkan pendapat mitra tutur salah. Dengan tuturan seperti itu akan dianggap tidak santun.

contoh: Silakan kalau tidak percaya. Semua akan terbukti kalau pendapat saya yang paling benar.

Tuturan di atas tidak santun karena penutur menyatakan dialah yang benar; dia memproteksi kebenaran tuturannya. Kemudian menyatakan pendapat yang dikemukakan lawan tuturnya salah.

4. Sengaja menuduh lawan tutur

Chaer (2010: 71) menyatakan bahwa acapkali penutur menyampaikan tuduhan pada mitra tutur dalam tuturannya. Tuturannya menjadi tidak santun jika penutur terkesan menyampaikan kecurigaannya terhadap mitra tutur.

contoh: Hasil penelitian ini sangat lengkap dan bagus. Apakah yakin tidak ada manipulasi data?

Tuturan di atas tidak santun karena penutur menuduh lawan tutur atas dasar kecurigaan belaka terhadap lawan tutur. Jadi, apa yang dituturkan dan juga cara menuturkannya dirasa tidak santun.

5. Sengaja memojokkan mitra tutur

Chaer (2010: 72) mengungkapkan bahwa adakalanya pertuturan menjadi tidak santun karena penutur dengan sengaja ingin memojokkan lawan tutur dan membuat lawan tutur tidak berdaya. Dengan ini, tuturan yang disampaikan penutur menjadikan lawan tutur tidak dapat melakukan pembelaan.

contoh: Katanya sekolah gratis, tetapi mengapa siswa masih diminta membayar iuran sekolah? Pada akhirnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah.

Tuturan di atas terkesan sangat keras karena terlihat keinginan untuk memojokkan lawan tutur. Tuturan seperti itu dinilai tidak santun, karena menunjukkan bahwa penutur berbicara kasar, dengan nada mara, dan rasa jengkel

E. Kesantunan dan Kebudayaan

Mengenai kericuhan di ruang sidang DPR, seperti sudah kiata bicarakan di atas, ada yang menanggapi sebagai hal yang wajar karena mereka para anggota DPR itu, datang dari berbagai budaya (daerah) yang berbeda. Apakah tanggapan ini bisa diterima? Untuk itu barangkali kita harus melihat dulu yang dimaksud dengan budaya atau kebudayaan itu.

Banyak pakar telah mengumpulkan berbagai macam definisi mengenai budaya. Di antaranya adalah Nababan (1984), yang membagi definisi mengenai kebudayaan itu atas empat yaitu:

1. Definisi yang melihat kebudayaan sebagai pengatur atau pangkat masyarakat.
2. Definisi yang melihat budaya sebagai hal-hal yang diperoleh manusia melalui belajar atau pendidikan
3. Difinisi yang melihat kebudayaan sebagai kebiasaan dan perilaku manusi.
4. Difinisi yang melihat kebuadyaan sebagai system komunikasi yang dipakai masyarakat untuk memperoleh kerja sama kesatuan dan kelangsungan hidup masyarakat manusia.

Bila dilihat dari keempat penggolongan difinisi kebudayaan itu bisa dikatakan bahwa kebudayaan melengkapi atau berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Difinisi kelompok (1) menyatakan kebudaan sebagai pengatur dan pengikat masyarakat. Ini artinya, kebudayaan merupakan aturan hukum, atau norma yang mengikat manusia sebagai mahluk hidup dan mahluk social. Berarti pula manusia tidak dapat berlaku sewenang-wenang, tetapi harus mematuhi norma yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam

kaitannya dengan berbahasa tentu ada norma atau aturan yang harus ditaati bagaimana caranya berbahasa dengan santun. Jadi, tidak benar kalau ada budaya yang membiarkan atau memperbolehkan anggota masyarakatnya tidak menuruti aturan kesantunan.

Difinisi golongan (2) yang melihat kebudayaan sebagai kebiasaan dan perilaku manusia, memang memungkinkan ada kelompok masyarakat berbudaya yang berbicara dengan suara keras seperti orang bertengkar, tetapi mungkin ada juga kelompok masyarakat yang berbicara dengan suara pelan dan lembut. Namun, betapapun kerasnya suara yang digunakan atau betapapun pelannya suara yang digunakan, pasti norma-norma kesantunan itu ada. Dalam hal ini pasti ada keterkejutan bagi anggota masyarakat yang biasa berbicara pelan dan lembut, bila mendengar orang dari masyarakat budaya lain berbicara keras.

Golongan (3) memang tidak bisa atau sukar berubah kecuali kalian mencoba atau berusaha menyesuaikan diri dengan kelompok budaya masyarakat yang baru dimasuki. Kalau berhasil menyesuaikan diri dengan kelompok masyarakat budaya lain berarti dia telah memperoleh sesuai sebagai yang dinyatakan dalam definisi golongan (3). Lalu kalau menyesuaikan diri ini berkenaan dengan system komunikasi manusia berarti dia telah memenuhi syarat masuk kedalam definisi golongan.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi mereka yang secara social memiliki kedudukan tinggi (seperti anggota DPR, pejabat tinggi negara, tokoh masyarakat, dan lain-lain) untuk tetap mempertahankan kebiasaan an perilaku budaya daerahnya dalam kehidupannya dalam lingkup masyarakat nasional, apalagi internasional. Kesantunan berbahasanya tidak lagi diukur berdasarkan budaya masyarakatnya. Tetapi harus diukur dengan norma-norma nasional. Bagaimana jadinya, kalau dalam pertemuan berlevel nasional, tetapi setiap individu mengukur kesantunan berbahasanya menurut norma masyarakat budayanya masing-masing. Pasti yang terjadi adalah kekisruhan dan kericuhan.

BAB II

PRINSIP KERJASAMA DAN MODEL KESANTUNAN

Sebelum belajar tentang ‘prinsip kerja sama’, kita perlu belajar tentang ‘asumsi pragmatik’. Kalau orang berbicara kepada orang lain pasti ingin mengemukakan sesuatu. Selanjutnya orang lain diharapkan menangkap apa (hal) yang dikemukakan. Dengan adanya 2 tujuan ini, maka orang akan berbicara sejelas mungkin, tidak berbelit-belit, ringkas, tidak berlebihan, berbicara secara wajar (termasuk volume suara yang wajar). Dalam pragmatik terdapat penyimpangan- penyimpangan, ada maksud-maksud tertentu, tetapi ia harus bertanggung jawab atas penyimpangan itu, sehingga orang lain bisa mengetahui maksudnya. Mereka harus bekerja sama.

Di dalam berkomunikasi, antara penutur (P) dengan mitra tutur (MT) harus saling menjaga prinsip kerja sama (cooperative principle) agar proses komunikasi berjalan dengan lancar. Tanpa adanya prinsip kerja sama komunikasi akan terganggu. Prinsip kerja sama ini terealisasi dalam berbagai kaidah percakapan. Kerja sama dapat diartikan sebagai keterlibatan partisipan dalam membentuk suatu percakapan lengkap dengan unsur- unsur yang diperlukan. Fungsi kerja sama adalah membentuk peristiwa tutur (Syamsuddin, et al., 1998: 94). Grice (dalam Arifin dan Rani, 2000:1149) mengemukakan mengenai prinsip kerja sama: *Make your contribution such as is required at the stage at which it accours,*

by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. “Berikanlah sumbangan Anda pada percakapan sebagaimana diperlukan, pada tahap terjadinya, oleh tujuan yang diterima atau arah pertukaran pembicaraan yang Anda terlibat di dalamnya.”

Dalam komunikasi, satu maksud atau satu fungsi dapat diungkapkan dengan berbagai bentuk/struktur. Untuk maksud “menyuruh” orang lain, penutur dapat mengungkapkannya dengan kalimat imperatif, kalimat deklaratif, atau bahkan dengan kalimat interogatif. Dengan demikian, pragmatik lebih cenderung ke fungsionalisme daripada ke formalisme. Pragmatik berbeda dengan semantik dalam hal pragmatik mengkaji maksud ujaran dengan satuan analisisnya berupa tindak tutur (speech act), sedangkan semantik menelaah makna satuan lingual (kata atau kalimat) dengan satuan analisisnya berupa arti atau makna.

Percakapan merupakan interaksi verbal antara dua partisipan atau lebih. Percakapan dalam hal ini lebih dari sekedar pertukaran informasi. Dalam hal ini, mereka akan berbagi prinsip-prinsip umum yang memudahkan mereka untuk saling menginterpretasikan tuturan.

Di dalam berkomunikasi seorang penutur mengomunikasikan sesuatu kepada petutur dengan harapan agar petutur itu dapat memahami apa yang dikomunikasikannya. Tidaklah mungkin akan terjadi komunikasi antara penutur dan petutur apabila antara keduanya tidak terjadi komunikasi. Oleh karena itu, seorang penutur harus selalu berusaha agar pembicaraannya itu relevan dengan konteks, jelas, mudah dipahami, padat dan ringkas, serta terfokus pada persoalan, sehingga tidak menghabiskan waktu. Dengan kata lain, antara penutur dan petutur terdapat prinsip kerja sama yang harus mereka lakukan agar proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

Kondisi ideal dalam pelaksanaan prinsip tuturan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan (tidak terpenuhinya prinsip kerja

sama). Ini disebabkan adanya keadaan tertentu yang secara sengaja dilakukan oleh penutur untuk tidak memenuhi tuntutan prinsip secara ideal.

Grice (Roekhan, 2002: 190) menyebutkan keadaan itu sebagai berikut.

1. keadaan yang menuntut penutur melanggar (to violate) ketentuan penggunaan maksim tutur yang normal,
2. keadaan yang menuntut penutur mengalihkan (to break) maksim tutur,
3. keadaan yang menuntut penutur mengabaikan (to opt out) maksim tutur, dan
4. keadaan yang menuntut penutur mendayagunakan (to floute) maksim tutur.

Oleh karena itu, Roekhan (2002:190) mengelompokkan penggunaan maksim tutur ke dalam dua kategori, yaitu (1) penggunaan maksim tutur yang sesuai dengan teori Grice, dan (2) penggunaan maksim tutur yang tidak sesuai dengan teori Grice. Pendayagunaan, pengintensifan, atau pengoptimalan prinsip kerja sama merupakan penerapan prinsip tutur yang khas, yang dilakukan secara sadar oleh penutur dengan maksud-maksud tertentu (Roekhan, 2002: 202). Hal ini diharapkan dapat menghasilkan makna implikatur tertentu yang dapat ditangkap oleh mitra tutur melalui inferensi. Dengan kata lain, penutur dapat menyimpulkan makna tambahan yang diperolehnya.

Kegagalan penggunaan maksim kerja sama ditandai oleh terganggunya komunikasi yang sedang terjadi. Dengan kata lain, informasi yang disampaikan tidak dapat diterima secara baik akibat adanya gangguan yang berat, bahkan dapat berakibat pula pada terancamnya hubungan antara penutur dan mitra tutur. Roekhan (2002:190) membedakan kegagalan penggunaan maksim kerja sama menjadi pelanggaran (to violate), pengabaian (to opt out), dan pengalihan (to break).

Pelanggaran terhadap maksim kerja sama dapat terjadi apabila penggunaannya tidak memenuhi ketentuan (Roekhan, 2002:191). Ini dapat berdampak pada terganggunya proses komunikasi yang sedang berlangsung. Adanya pelanggaran terhadap maksim kerja sama disebabkan oleh suatu keadaan yang mendorong penutur untuk tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Roekhan (2002:191) menyebutkan keadaan yang dimaksud, yaitu 1) ketika penutur kurang atau tidak menguasai permasalahan yang dibahas atau disampaikan, dan 2) ketika penutur kurang atau tidak memahami konteks komunikasi tutur yang sedang terjadi.

Pelanggaran terhadap maksim ini dapat dicontohkan pada keadaan seorang guru yang kurang menguasai materi pelajaran. Akibatnya, guru tersebut dihadapkan pada dua pilihan yang berat, yaitu mengakui ketidakmampuannya dengan terus terang atau berusaha untuk menutupinya. Apabila guru mengakui ketidakmampuannya, berarti ia harus siap dipermalukan bahkan dicemooh di depan kelas oleh siswanya. Sebaliknya, jika guru berusaha menutupi ketidak- mampuannya, berarti ia akan menggunakan tuturan yang berputar-putar sehingga sulit dipahami oleh siswa.

Pengabaian maksim tutur dapat dikatakan sebagai penyimpangan yang dilakukan secara sengaja. Ini dilakukan karena penutur tidak menghendaki terjadinya komunikasi saat itu sehingga ia tidak melakukan kerja sama yang baik dengan mitra tuturnya (Roekhan, 2002: 195).

Akibatnya komunikasi terganggu, bahkan dapat mengalami kegagalan. Roekhan (2002: 196) menyebutkan hal yang menyebabkan penutur mengabaikan maksim tuturnya, yaitu 1) ketika penutur ingin berbohong kepada mitra tutur, dan 2) ketika penutur ingin merahasiakan informasi yang dimilikinya. Dengan demikian, penutur akan berusaha menggunakan tuturan yang taksa atau menyampaikan informasi yang bohong. Pengabaian maksim tutur ini contohnya dapat terjadi pada seorang anak perempuan

yang bermaksud menemui teman laki-lakinya, namun tidak ingin diketahui oleh ibunya sehingga saat ditanya, si anak akan menjawab sebagai berikut: “Saya mau ke rumah teman untuk mengerjakan tugas kelompok” atau “Ani berulang tahun hari ini jadi saya akan ke rumahnya” atau “Sore ini ada les tambahan dari sekolah.”

Pengalihan maksim kerja sama terjadi apabila penutur dihadapkan pada dua maksim tutur yang bertentangan (Roekhan, 2002: 200). Apabila satu maksim digunakan secara baik, maksim lainnya akan diabaikan. Demikian pula sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini, penutur terpaksa untuk memenuhi salah satu maksim tutur saja dan mengabaikan maksim tutur yang lain. Contohnya, percakapan antara polisi penyidik dengan seorang tersangka. Dalam komunikasi seperti itu, polisi dihadapkan pada tuntutan penggunaan maksim kuantitas, maksim hubungan, dan maksim cara. Apabila polisi bermaksud memenuhi maksim kuantitas dan maksim hubungan, berarti polisi harus melanggar maksim cara. Sebaliknya, apabila polisi memenuhi maksim cara, berarti polisi telah melanggar maksim kuantitas dan maksim hubungan.

Jika polisi memilih untuk memenuhi tuntutan maksim hubungan, maka ia harus menanyakan hal-hal yang informasi awalnya telah dimiliki oleh tersangka. Akan tetapi, jika hal itu dilakukannya, ia tidak pernah memperoleh informasi-informasi penting yang diharapkannya. Sama halnya kalau polisi memenuhi tuntutan maksim kuantitas, ia hanya akan menanyakan hal-hal yang telah pasti dan jelas saja. Informasi yang masih bersifat dugaan tidak ditanyakan kepada tersangka karena hal itu melanggar ketentuan maksim kuantitas.

Berdasarkan uraian itu, wajar apabila polisi penyidik memilih merusak maksim hubungan dan kuantitas, dan hanya memenuhi tuntutan maksim cara saja. Hal ini dilakukan agar upayanya untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnyanya dapat tercapai. Secara lebih rinci, Grice menjabarkan prinsip kerja sama itu menjadi empat maksim percakapan (periksa

Gunarwan, 1993: 11; Lubis, 1993: 73; dan bandingkan pula Wijana, 1996:46-53). Keempat maksim percakapan itu ialah sebagai berikut.

A. Maksim kuantitas:

- 1). Berikan informasi Anda secukupnya atau sejumlah yang diperlukan oleh MT.
- 2). Bicaralah seperlunya saja, jangan mengatakan sesuatu yang tidak perlu.

B. Maksim kualitas:

- 1). Katakanlah hal yang sebenarnya.
- 2). Jangan katakan sesuatu yang Anda tahu bahwa sesuatu itu tidak benar.
- 3). Jangan katakan sesuatu tanpa bukti yang cukup.

C. Maksim relevansi:

- 1). Katakan yang relevan.
- 2). Bicaralah sesuai dengan permasalahan.

D. Maksim cara:

- 1). Katakan dengan jelas.
- 2). Hindari kekaburanan ujaran.
- 3). Hindari ketaksaan.
- 4). Bicaralah secara singkat, tidak bertele-tele.
- 5). Berkatalah secara sistematis.

Kenyataan membuktikan, di dalam percakapan sehari-hari tidak jarang kita temukan praktik-praktik pelanggaran terhadap maksim-maksim Grice tersebut. Akan tetapi, bagi pengamat pragmatik, justru pelanggaran-pelanggaran itulah yang menarik untuk dikaji: mengapa P melakukan pelanggaran terhadap maksim tertentu, ada maksud apa di balik pelanggaran maksim tersebut? Misalnya, mengapa P yang bermaksud meminjam uang atau memerlukan bantuan kepada MT biasanya diawali dengan menceritakan secara panjang lebar keadaan dirinya seraya disertai dengan janji- janji?

Apakah itu berlaku secara universal? Bukankah tindakan tersebut melanggar maksim kuantitas?

Pada hemat saya, diantara empat maksim itu, maksim ketiga atau maksim relevansilah yang paling penting sebab betapa pun informasi yang kita sampaikan itu cukup serta disampaikan dengan cara yang jelas, sistematis, dan tidak ambigu, kalau informasi itu tidak relevan dengan permasalahan toh tidak akan membawa manfaat. Sejauh mana asumsi ini benar juga masih memerlukan pengkajian secara pragmatis.

Asumsi pragmatik ini merupakan titik acuan (point of reference). Untuk memenuhi komunikasi secara wajar dan terjadi kerja sama yang baik, maka dalam komunikasi harus memenuhi prinsip (maksim). Dalam pragmatik dikontrol oleh maksim (principle controlled), sedangkan dalam gramatika/ tatabahasa diatur oleh kaidah (rule governed). Terdapat beberapa asumsi pragmatik, yaitu:

1. Maksim Kuantitas

Berbicara sejumlah yang dibutuhkan oleh pendengar. Kalau lebih berarti ada tujuannya. Misalnya: Ibu kota Provinsi Jawa Timur Surabaya. (Secara kuantitas cukup jelas). Ibu kota Provinsi Jawa Timur Sura Tuturan ini disampaikan oleh guru, lalu murid menjawab baya.

2. Maksim Kualitas

Prinsip yang menghendaki orang-orang berbicara berdasarkan bukti-bukti yang memadai. Misalnya: Buku itu dibuat dari kertas. Bukti cukup memadai, tetapi apabila ada tuturan *Buku itu dibuat dari nasi, bukti tidak memadai. Dalam kaitannya dengan maksim kualitas, terdapat penyimpangan maksim, misalnya Modal saja tidak bisa dan Untung saja tidak dapat.

3. Maksim relevansi

Penutur dan mitra tutur berbicara secara relevan berdasarkan konteks pembicaraan. Misalnya:

A : Sekarang jam berapa?

B : Azan baru saja terdengar

Jawaban dari MT tidak langsung menjawab tentang satuan waktu, tetapi direlevansikan dengan suara Adzan yang menunjukkan waktu salat.

4. Maksim cara

Tuturan harus dikomunikasikan secara wajar, tidak boleh ambigu (taksa), tidak terbalik (harus runtut). Misalnya:

A : Dia penyanyi solo.

B : Benar, dia sering tampil di TVRI.

Tetapi kadang-kadang dalam tuturan yang wajar terjadi disambiguasi (pengawaambiguan), sehingga kata-kata yang ambigu itu hanya satu makna. Misalnya:

A : Kamu penjahat kelas kakap, ya?

B : Bukan, hui.

A : Ini Tanah Abang, ya?

B : Jangan menghina, masak saya miskin seperti ini punya tanah.

Keempat prinsip tersebut di atas termasuk pada jenis 'retorika tekstual' sebab dalam pragmatik dikenal adanya retorika tekstual dan retorika interpersonal. Retorika tekstual harus memenuhi 4 prinsip (maksim) kerja sama, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Sedangkan retorika interpersonal harus memperhitungkan orang lain. Jadi tidak hanya bersifat tekstual.

Retorika interpersonal membutuhkan prinsip kesopanan (politeness principle). Ada 6 macam prinsip agar memenuhi prinsip kesopanan. Sebelum sampai pada prinsip kesopanan, perlu mengingat kembali dari adanya kategori sintaktik yang terdiri dari berita, tanya, dan perintah. Dalam kategori pragmatik didasarkan pada fungsi komunikatifnya. Yang diperhatikan adalah tuturan.

Dalam kaitannya dengan kategori pragmatik ini ada tuturan komisif, tuturan impositif (direktif), tuturan asertif, tuturan ekspresif.

1) Tuturan komisif: berjanji, menawarkan. Misalnya:

Saya akan datang.

Boleh saya bawakan?

Saya akan setia. Swear.

2) Tuturan impositif (direktif): menyuruh, memerintah, memohon. Misalnya: Apakah Anda bisa menolong saya.

Saya akan datang (ada efek yang lain untuk memerintah)

3) Tuturan asertif: menyatakan sesuatu (objektif). Misalnya:

Bali terletak di sebelah timur Pulau Jawa.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Undiksa memiliki 9 jurusan.

4) Tuturan ekspresif: menyatakan perasaan (emosi). Misalnya:

Gedung itu indah sekali.

Gadis itu cantik sekali.

Kadang-kadang sulit dibedakan antara tuturan asertif dengan ekspresif.

Selanjutnya agar memenuhi prinsip (maksim) kesopanan, berikut ini inti 6 prinsip kesopanan menurut Leech.

1. Maksim kebijaksanaan/kedermawanan, *tact maxim*.

Ditujukan pada orang lain (*other centred maxim*). Jenis maksim ini untuk berjanji dan menawarkan (impositif, komisif). Memaksimalkan keuntungan orang lain, meminimalkan kerugian orang lain. Misalnya:

A : Ada yang bisa saya bantu? Mari saya bawakan!

B : Tidak usah. Terima kasih. Oh ya,... terima kasih

Tuturan A dan B disebut pragmatik paradoks.

2. Maksim penerimaan (*approbation maxim*). Ditujukan pada diri sendiri, bukan pada orang lain (*self centred maxim*).

Maksim penerimaan ini ditujukan untuk menawarkan dan berjanji. memaksimalkan kerugian diri sendiri, meminimalkan keuntungan diri sendiri. Misalnya:

Bolehkah saya bantu?

Mari saya bantu.

Apakah Anda bersedia membawakan..... ?

Bawakan ini! (tidak sopan)

Mari saya antarkan!

Tolong saya dihantarkan!

3. Maksim kemurahan (generosity maxim). Pusatnya orang lain (other centred maxim) Maksim ini ditujukan untuk kategori asertif dan ekspresif. Memaksimalkan rasa hormat pada orang lain, meminimalkan rasa tidak hormat pada orang lain. Misalnya:

Rumahmu nyaman sekali sekali,

Pekaranganya luas, sayang kalau tidak ditanami.

4. Maksim kerendahhatian (modesty maxim).

Pusatnya pada diri sendiri (self centred maxim). Meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri dan memaksimalkan rasa tidak hormat pada diri sendiri. Misalnya:

A : Kau sangat pandai.

B : Ah tidak, biasa-biasa saja. A : Mobilnya bagus!

B : Ah, begini saja kok bagus.

5. Maksim kesetujuan atau kecocokan (agreement maxim).

Pusatnya pada orang lain (other centred maxim). Ditujukan untuk menyatakan pendapat dan ekspresif. Memaksimalkan kesetujuan pada orang lain dan meminimalkan ketidaksetujuan pada orang lain. Misalnya:

A : Rumah pak Herman luas dan resik.

B : Iya, luas dan sejuk

A : Rumah pak Herman luas dan resik

B : Ah ... biasa saja kok ... malah kurang nyaman.
(Ketidaksetujuan total / tidak sopan)

A : Wah, cantik sekali kamu?

B : Iya, kaya kera (Ketidaksetujuan parsial /sopan)

6. Maksim kesimpatian (*sympathy maxim*). Pusatnya orang lain (*other centred maxim*). Ditujukan untuk menyatakan asertif dan ekspresif. Memaksimalkan simpati pada orang lain dan meminimalkan antipati pada orang lain. Misalnya:

A : Saya lolos di UMPTN, Jon.

B : Selamat, ya.

A : Baru-baru ini dia telah meninggal.

B : Oh, saya turut berduka cita.

B. MODEL KESANTUNAN BROWN – LEVINSON

1. Keinginan Wajah

Di dalam interaksi sosial sehari-hari, orang pada umumnya berperilaku seolah-olah ekspektasi mereka terhadap *public self-image* yang mereka miliki akan dihargai orang lain. Jika seorang penutur mengatakan sesuatu yang merupakan ancaman terhadap ekspektasi orang lain mengenai *self-image* mereka, tindakan tersebut dikatakan sebagai *Face Threatening Act* (FTA). Sebagai alternatif, seseorang dapat mengatakan sesuatu yang memiliki kemungkinan ancaman lebih kecil. Hal ini disebut sebagai *Face Saving Act* (FSA). Perhatikan contoh berikut:

Seorang tetangga sedang memainkan musik sangat keras dan pasangan suami istri sedang mencoba untuk tidur. Si suami dapat melakukan FTA: “Aku akan mengatakan padanya untuk mematikan musik berisik itu sekarang juga!” atau si istri dapat melakukan FSA: “Barangkali kita dapat memintanya untuk berhenti memainkan musik itu karena sekarang sudah mulai larut dan kita perlu tidur”.

2. Negative dan Positive Face

Menurut Brown dan Levinson, *negative face* adalah *the basic claim to territories, personal preserves, and rights to non-distraction* dan *positive face* adalah *the positive and consistent image people have of themselves, and their desire for approval*. Dengan kata lain, *negative face* adalah kebutuhan untuk mandiri dan *positive face* adalah kebutuhan untuk terkoneksi (menjalin hubungan). Sehubungan dengan *negative* dan *positive face*, maka dapat disimpulkan bahwa FSA berorientasi pada *negative face* dan mementingkan kepentingan orang lain, bahkan termasuk permintaan maaf atas gangguan yang diciptakan. FSA seperti ini dinamakan *negative politeness*. Sedangkan FSA yang berorientasi terhadap *positive face* seseorang akan cenderung menunjukkan solidaritas dan menekankan bahwa kedua pihak (penutur dan mitra tutur) menginginkan hal yang sama dan tujuan yang sama pula. FSA dalam bentuk ini dinamakan *positive politeness*.

Secara singkat, Yule (2010:135) membedakan *positive face* dan *negative face* sebagai berikut.

	Positive Face	Negative Face
Keinginan	Pendekatan sosial	Kebebasan dari pembebanan
Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">• untuk terhubung• Untuk diterima sebagai anggota kelompok yang memiliki tujuan yang sama• untuk mandiri• Untuk memiliki kebebasan bertindak, dan tidak terbebani	
Penekanan	Pada solidaritas dan kesamaan	pada penghormatan dan kepedulian

3. Negative and Positive Politeness

Negative politeness memberikan perhatian pada *negative face*, dengan menerapkan jarak antara penutur dan mitra tutur dan tidak mengganggu wilayah satu sama lain. Penutur menggunakannya untuk menghindari paksaan, dan memberikan mitra tutur pilihan. Penutur dapat menghindari kesan memaksa dengan menekankan kepentingan orang lain dengan menggunakan permintaan maaf, atau dengan mengajukan pertanyaan yang memberikan kemungkinan untuk menjawab “tidak”. Misal, di sebuah gedung *student center*, Anda meminta pertolongan untuk menyebutkan alamat situs yang Anda perlukan dengan berkata pada David,

“Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu, tapi barangkali Anda bisa memberitahukan alamat situs yang dosen bicarakan tadi pagi?”

Contoh yang lain,

“Maaf mengganggu, Bisakah saya meminjam uang lima ratus ribu, ehmm, jika kamu Anda tidak membutuhkannya sekarang?”

Adanya pemberian pilihan berpengaruh pada tingkat kesantunan. Semakin besar kemungkinan pilihan jawaban “tidak” diberikan, maka semakin sopanlah tuturan tersebut.

Positive politeness bertujuan untuk menyelamatkan dengan menerapkan kedekatan dan solidaritas, biasanya dalam pertemanan atau persahabatan, membuat orang lain merasa nyaman dan menekankan bahwa kedua pihak (penutur dan mitra tutur) memiliki tujuan yang sama. Misal Anda masih berada di *student center* dan masih memerlukan bantuan, kali ini Anda meminta bantuan pada teman dekat Anda, Rudi. “Rudi, kamu kan punya memori yang baik dan keren, akan lebih keren jika kamu memberitahu saya alamat situs yang dimaksud pak Handano tadi pagi.”

4. Superstrategies Dalam Kesopanan

Dalam setiap tindak tutur, kita selalu memiliki banyak ekspresi tuturan. Brown and Levinson (1987) menyarankan beberapa *superstrategies* bagi pengguna bahasa untuk bias

berkomunikasi dengan cara yang sopan (dikutip dari Yule, 1996, pp.62-66).” Contoh berikut ini akan member penjelasan mengenai *superstrategies*. Misalnya Anda sedang mengikuti ujian. Anda kemudian menyadari bahwa anda tidak membawa pena. Anda yakin teman sekelas anda akan memberi bantuan. Dalam kasus ini, pertama-tama anda harus membuat keputusan apakah mengatakan sesuatu atau tidak.

a. Tidak mengatakan sesuatu

Anda dapat langsung mencari di dalam tas tanpa mengatakan apapun menunggu teman anda bertanya atau menawarkan bantuan. Pendekatan ‘tidak mengatakan apapun’ mungkin berhasil atau tidak berhasil. Hal tersebut bergantung pada bagaimana orang lain menginterpretasikan tindakan anda.

b. Mengatakan sesuatu : *off record*

Jika anda memutuskan untuk mengatakan sesuatu, anda bisa berkata: “*Oh dear. I Forgot my pen*”. Sama halnya dengan pendekatan ‘tidak mengatakan sesuatu’, mengatakan sesuatu: *off record* ini juga memiliki kemungkinan untuk berhasil atau pun gagal. Tidak ada jaminan bahwa orang lain pasti memahami maksud anda.

c. Mengatakan sesuatu: *on record*

Berlawanan dengan pernyataan *off record*, anda bisa mengekspresikan kebutuhan anda dengan langsung berbicara pada seseorang. Cara yang paling eksplisit untuk menyatakan kebutuhan anda adalah dengan tegas *on record*. Anda bisa secara langsung meminta bantuan dengan mengatakan: “*Give me a pen!*” Permintaan yang tegas, mengikuti maksim Grice adalah benar-benar langsung dan ringkas. Meskipun demikian, hal ini memiliki potensi mengancam muka mitra tutur jika permintaan ini dianggap sebagai sebuah perintah. Untuk menghindari hal tersebut, anda harus melakukan *face saving acts* yang menggunakan strategi kesopanan positif dan negative untuk meredam ancaman.

- Strategi kesopanan positif berorientasi pada usaha untuk memperbaiki ancaman *positive face* pendengar. Ketika anda menggunakan kesopanan positif, cobalah untuk membayangkan bahwa pendengar memiliki dasar yang sama atau bahkan memiliki hubungan pertemanan dengan anda. Menggunakan bahasa identitas dalam sebuah kelompok, anda bisa berkata: (“*How about letting me use your pen?*”) bentuk *let* menandai adanya rasa solidaritas di antara pembicara dan pendengar. Namun demikian, tetap saja strategi ini memiliki resiko untuk ditolak jika si pendengar berbeda tingkat social dengan anda. Dalam kasus ini, strategi kesopanan sebaliknya mungkin lebih tepat untuk digunakan.

Strategi kesopanan negatif tidak selalu bermaksud tidak baik. Kenyataannya, strategi ini bermaksud memperbaiki fakta negative yang mengancam pendengar. Anda dapat meminta bantuan secara tidak langsung dengan bertanya “*Could you lend me a pen?*” atau “*Sorry to bother you, but may I borrow your pen?*” Pertanyaan-pertanyaan ini didahului oleh ungkapan permintaan maaf untuk pembebanan yang menunjukkan keprihatinan anda tentang kerugian untuk pendengar. Selain itu, meminta izin untuk mengajukan pertanyaan lebih sopan.

BAB III

TINDAK TUTUR SEBAGAI SALAH SATU ASPEK DALAM KESANTUNAN BERBAHASA

Pembahasan mengenai kesantunan berbahasa tidak dapat dilepaskan dari tindak tutur. Tindak tutur dalam kesantunan berbahasa sangat penting karena berhubungan dengan tindakan yang dilakukan atau perwujudan gagasan, konsep, ide penutur dalam suatu komunikasi. Dalam bertutur, orang tidak hanya menitikberatkan pada tuturan yang diucapkan tetapi juga berhubungan dengan konteks atau situasi saat tuturan tersebut diucapkan. Seorang penutur yang ingin memveri perintah kepada mitra tuturnya dapat saja menggunakan pertanyaan maupun pernyataan. Dalam hal kesantunan berbahasa, tindak tutur ilokusi sering digunakan oleh penutur dengan tujuan memperhalus tuturan. Tuturan yang harus akan terdengar lebih santun dan lebih berterima bagi mitra tutur daripada tuturan yang kasar dan lugas.

Tindak tutur atau *'speech act'* yang dikemukakan oleh Austin (via Levinson, 1983:236) ada tiga macam, yaitu (1) tindak lokusi yang merupakan ujaran yang dikemukakan oleh penutur, (2) tindak ilokusi adalah maksud yang terkandung dalam ujaran, (3) tindak perlokusi berupa efek yang timbul dari ujaran tersebut. Tuturan "Saya luoa membawa pena" yang dituturkan seorang penutur kepada mitra tuturnya mempunyai tindak lokusi berupa informasi. Tuturan tersebut juga memunyai tinfak ilokusi yaitu penutur bermaksud

untuk meminjam pena kepada mitra tuturnya sedangkan tindak perlokusinya adalah mitra tuturnya meminjamkan pena kepada penutur. Penutur mengutarakan keinginannya tersebut secara tidak langsung dengan sebuah pernyataan, “Saya lupa membawa pena”. Penutur sebenarnya dapat juga mengatakan, “Apakah Anda membawa pena?”. Tuturan tersebut berdentar lebih santun dari pada penutur menyatakannya secara langsung dengan tuturan, “Pinjamkan pena pada saya”. Dengan demikian tinfak tutur ilokusi dapat mengikis ketidaksantunan sebuah tuturan.

Searle salah seorang murid Austin kemudian mengembangkan pemikiran gurunya menjadi lebih luas. Ia membagi tindak tutur menjadi lima jenis yaitu, (1) asertif, (2) komisif, (3) ekspresif, (4) direktif, (5) deklaratif. Tuturan asertif adalah bentuk tutur yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya menyarankan, membual, mengeluh, dan mengklaim. Tuturan direktif adalah bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh agar mitra tutur melakukan tindakan tertentu, misalnya memerintah, memohon, menasehati. Tuturan ekspresif adalah tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan, misalnya berterima kasih, meminta maaf, menyalahkan, memuji, atau belasungkawa. Bentuk tuturan komisif berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran, misalnya berjanji, bersumpah, menawarkan. Tindak tutur deklarasif adalah tinfak tutur yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan, misalnya menghukum, mengangkat.

A. Pengertian Tindak Tutur

Tindak tutur (istilah Kridalaksana ‘pertuturan’ (speech act, speech event): pengujaran kalimat untuk me- nyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengar (Kridalaksana, 1984:154) Speech act: an uTindak tuturerance as a functional unit in communication (Richards et al, 1989: 265). Di dalam mengatakan suatu kalimat, se- seorang tidak semata-mata mengatakan sesuatu

dengan pengucapan kalimat itu. Di dalam pengucapan kalimat ia juga “menindakkan” sesuatu. Dengan pengucapan kalimat Mau minum apa? si pembicara tidak semata-mata menanyakan atau meminta jawaban tertentu; ia juga menindakkan sesuatu, yakni menawarkan minuman. Seorang ibu rumah pondokan putri, mengatakan Sudah pukul sepuluh. ia tidak semata- mata memberi tahu keadaan jam pada waktu itu; ia juga menindakkan sesuatu, yaitu memerintahkan si mitratatur supaya pergi meninggalkan rumah pondokannya. Hal-hal apa sajakah yang dapat ditindakkan di dalam berbicara? Ada cukup banyak; antara lain, permintaan (requests), pemberian izin (permissons), tawaran (offers), ajakan (invitation), penerimaan akan tawaran (acceptation of offers).

Tindak tutur merupakan analisis pragmatik, yaitu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dari aspek pemakaian aktualnya. Tindak tutur memilikirangkaian yang berupa peristiwa tutur. Tindak tutur lebih melihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya, tetapi peristiwa tutur lebih melihat pada tujuan peristiwanya. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi (Chaer, 1995:65).

Bahasa merupakan alat interaksi sosial atau alat komunikasi manusia. Dalam setiap komunikasi manusia saling menyampaikan informasi yang dapat berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara langsung. Menurut pengalaman nyata, bahasa itu selalu muncul dalam bentuk tindakan atau tingkah tutur individual. Karena itu tiap telaah struktur bahasa harus dimulai dari pengkajian tindak tutur. Tindak tutur merupakan perwujudan konkret fungsi-fungsi bahasa, yang merupakan pijakan analisis pragmatik (Rahardi, 2005).

Tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya.

Kalimat “Disini panas sekali!” dapat memiliki bermacam arti di berbagai situasi berbeda. Bisa jadi, si penutur hanya menyatakan fakta keadaan udara saat itu, meminta orang lain membukakan jendela atau menyalakan AC, atau bahkan keluhan/complain. Oleh karena itu, kemampuan sosiolinguistik, termasuk pemahaman mengenai tindak tutur sangat diperlukan dalam berkomunikasi karena manusia akan sering dihadapkan dengan kebutuhan untuk memahami dan menggunakan berbagai jenis tindak tutur, dimana masing- masing jenis tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai macam strategi. Ada beberapa tokoh terkemuka terkait teori tindak tutur, misalnya J.L. Austin, J.R. Searle, G.N. Leech, dan H.P. Grice.

Tindak tutur atau tindak ujar (speech act) merupakan entitas yang bersifat sentral dalam pragmatik sehingga bersifat pokok di dalam pragmatik. Tindak tutur merupakan dasar bagi analisis topik-topik pragmatik lain seperti praanggapan, prinsip kerja sama, dan prinsip kesantunan. Tindak tutur memiliki bentuk yang bervariasi untuk menyatakan suatu tujuan. Misalnya menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara ini, “Saya memerintahkan anda untuk meninggalkan gedung ini segera”. Tuturan tersebut juga dapat dinyatakan dengan tuturan “Mohon anda meninggalkan tempat ini sekarang juga” atau cukup dengan tuturan “Keluar”. Ketiga contoh tuturan di atas dapat ditafsirkan sebagai perintah apabila konteksnya sesuai.

Austin (1962) menyebutkan bahwa pada dasarnya pada saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Pernyataan tersebut kemudian mendasari lahirnya teori tindak tutur. Yule (1996) mendefinisikan tindak tutur sebagai tindakan yang dilakukan melalui ujaran. Sedangkan Cohen (dalam Hornberger dan McKay (1996) mendefinisikan tindak tutur sebagai sebuah kesatuan fungsional dalam komunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan suatu ujaran mengandung tindakan sebagai suatu kesatuan fungsional dalam komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur.

Tindak tutur dan peristiwa tutur sangat erat terkait. Keduanya merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi. Peristiwa tutur merupakan peristiwa sosial karena menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam satu situasi dan tempat tertentu. Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur (inggris: speech act) yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, tindak tutur selalu berada dalam peristiwa tutur. Kalau peristiwa tutur merupakan gejala sosial seperti disebut di atas, maka tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya.

B. Tindak Tutur Austin

Teori tindak tutur muncul sebagai reaksi terhadap 'descriptive fallacy', yaitu pandangan bahwa kalimat deklaratif selalu digunakan untuk mendeskripsikan fakta atau 'state of affairs', yang harus dilakukan secara benar atau secara salah (Malmkjær, 2006: 560). Padahal, menurut Austin, banyak kalimat deklaratif yang tidak mendeskripsikan, melaporkan, atau menyatakan apapun, sehingga tidak bisa dinyatakan benar-salahnya. Ujaran dari kalimat tersebut adalah (bagian dari) kegiatan/tindakan. Misalnya, kalimat "Saya nikahkan... dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai." yang diucapkan oleh penghulu di sebuah acara pernikahan merupakan "the doing of some action", dalam hal ini, merupakan tindakan penghulu dalam menikahkan pasangan pengantin, bukan sekedar perkataan belaka, atau "saying something" (hal. 560).

Ada dua jenis ujaran, menurut Austin, yaitu ujaran konstatif dan performatif. Ujaran konstatif ujaran yang tidak melakukan tindakan dan dapat diketahui salah-benarnya. Menurut Austin (1962), ujaran konstatif adalah jenis ujaran yang melukiskan suatu

keadaan faktual, yang isinya boleh jadi merujuk ke suatu fakta atau kejadian historis yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Ujaran konstatif memiliki konsekuensi untuk ditentukan benar atau salah berdasarkan hubungan faktual antara si pengujar dan fakta sesungguhnya. Jadi, dimensi pada ujaran konstatif adalah benar-salah. Contoh: *Kamu terlihat bersedih.*

Ujaran performatif, yaitu ucapan yang berimplikasi dengan tindakan si penutur sekalipun sulit diketahui salah-benarnya, tidak dapat ditentukan benar-salahnya berdasarkan faktanya karena ujaran ini lebih berhubungan dengan perilaku atau perbuatan si penutur. Ujaran seperti “Kamu dipecat!”, “Dengan ini Saudara saya nyatakan bersalah” merupakan contoh ujaran performatif. Dimensi pada ujaran performatif adalah senang-tidak senang (*happy/felicitious-unhappy/ infelicitious*), yang ditentukan melalui empat jenis kondisi, yaitu: (1) adanya konvensi umum bahwa ujaran kata-kata tertentu oleh orang tertentu dalam situasi tertentu akan menghasilkan efek tertentu, (2) semua partisipan dalam prosedur (1) harus melaksanakan prosedur tersebut secara benar dan lengkap/ sempurna, ((3) jika konvensinya adalah bahwa partisipan dalam prosedur tersebut memiliki pikiran, perasaan dan niat tertentu, maka partisipan berarti memiliki pikiran, perasaan dan nita tertentu tersebut, dan (4) jika konvensinya adalah setiap partisipan harus bersikap tertentu, berarti partisipan tersebut harus bersikap tertentu (sesuai konvensinya). Jika satu dari kondisi diatas tidak terpenuhi, berarti ujaran performatif tersebut tidak senang (*unhappy*). Namun, kemudian Austin sendiri meragukan cara pembedaan di atas dengan mengajukan tes “*I hereby*” untuk menentukan ujaran performatif atau konstatif. Austin menyebutkan bahwa ujaran performatif bercirikan “*speech act verbs*” atau verba performatif. Pembedaan diatas kemudian ditinggalkan. Austin kemudian membedakan ujaran performatif eksplisit dan implisit, yang dicirikan dengan ada tidaknya verba performatif.

Sumbangan terbesar Austin dalam teori tindak tutur adalah pembedaan tindak lokusi, ilokusi dan perlokusi. Menurut Austin, setiap kali penutur berujar, dia melakukan tiga tindakan secara bersamaan, yaitu (a) tindak lokusi (locutionary acts), tindak ilokusi (illocutionary acts) dan tindak perlokusi (perlocutionary acts). Menurut Austin (1962), andai si penutur berniat menguratakan sesuatu yang pasti secara langsung, tanpa keharusan bagi si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya, niatannya disebut tindak tutur lokusi. Bila si penutur berniat mengutarakan sesuatu secara langsung, dengan menggunakan suatu daya yang khas, yang membuat penutur bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya, niatannya disebut tindak tutur ilokusi. Dalam pernyataan lain, tindak ilokusi adalah tindak dalam menyatakan sesuatu (performatif) yang berlawanan dengan tindak menyatakan sesuatu (konstatif).

Sementara itu, jika si penutur berniat menimbulkan respons atau efek tertentu kepada mitra tuturnya, niatannya disebut tindak tutur perlokusi. Bila tindak lokusi dan ilokusi lebih menekankan pada peranan tindakan si penutur, tindak perlokusi justru lebih menekankan pada bagaimana respons si mitra tutur. Hal yang disebutkan terakhir ini, menurut Austin, berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai pemengaruh pikiran dan perasaan manusia. Kendati demikian, ketiga tindak tutur tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren di dalam keseluruhan proses tindak pengungkapan bahasa sehingga seharusnya mencerminkan prinsip adanya satu kata dan tindakan atau perbuatan.

Tindak lokusi, melakukan tindakan untuk mengatakan sesuatu. Tindakan lokusi mengandung makna literal. Contoh: "It is hot here", makna lokusinya berhubungan dengan suhu udara di tempat itu. Contoh lain 'Saya lapar', seseorang mengartikan 'Saya' sebagai orang pertama tunggal (si penutur), dan 'lapar' mengacu pada 'perut kosong dan perlu diisi', tanpa bermaksud untuk meminta makanan. Dengan kata lain, tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti "berkata" atau tindak tutur

dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Dalam tindak lokusi, Austin membagi tiga subjenis, yaitu:

1. Tindak fonik (phonic), yaitu dikeluarkannya bunyi atau phones
2. Tindak fatik (phatic) yaitu adanya phemes, bunyi-bunyi tersebut memiliki kosakata dan mengikuti aturan tata bahasa tertentu (phemes).
3. Tindak retik (rhetic), yaitu adanya makna dan referensi (rhemes)

Semua tindak tersebut dilakukan pada saat melakukan tindak lokusi. Malmkjer (2006) menyatakan bahwa setiap penutur melakukan tindak lokusi, dia juga melakukan tindak ilokusi, misalnya menyatakan, berjanji, mengingatkan, dsb. Tindak ilokusi, melakukan suatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Pada tindak tutur ilokusi, penutur menyatakan sesuatu dengan menggunakan suatu daya yang khas, yang membuat si penutur bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya. Tindakan ini mengandung makna yang berhubungan dengan fungsi sosial. Pada kalimat “It is hot here”, makna ilokusinya mungkin permintaan (request) agar membuka jendela lebar-lebar, atau bila kalimat tersebut diulang-ulang, mungkin mengisyaratkan keluhan (complaint). Contoh lain: “Sudah hampir pukul tujuh.” Kalimat di atas bila dituturkan oleh seorang suami kepada istrinya di pagi hari, selain memberi informasi tentang waktu, juga berisi tindakan yaitu mengingatkan si istri bahwa si suami harus segera berangkat ke kantor, jadi minta disediakan sarapan. Oleh karena itu, si istri akan menjawab mungkin seperti kalimat berikut, “Ya Pak! Sebentar lagi sarapan siap.”

Austin membagi tindak ilokusi kedalam lima subjenis:

1. verdiktif (verdictives), tindak tutur yang ditandai oleh adanya keputusan yang bertalian dengan benar-salah, misalnya (perhatikan kata yang bergaris bawah), “Hamdan dituduh menjadi dalang unjuk rasa”

2. Eksersitif (*exercitives*), tindak tutur yang merupakan akibat adanya kekuasaan, hak, atau pengaruh, misalnya “saya meminta Anda untuk datang ke kantor pagi-pagi,” ujar Zacky kepada sekretarisnya;
3. Komisif (*commissives*), tindak tutur yang ditandai oleh adanya perjanjian atau perbuatan yang menyebabkan si penutur melakukan sesuatu, misalnya “Universitas Nasional menandatangani kerja sama dengan University Malaya dalam penerbitan jurnal ilmiah,” ucap Lina di muka rapat pimpinan.
4. Behavitif (*behavitives*), tindak tutur yang mencerminkan kepedulian sosial atau rasa simpati, misalnya “Pemerintah Singapura ikut prihatin terhadap TKI Indonesia yang mengalami penyiksaan di Arab Saudi,” dan
5. Ekspositif (*expositives*), tindak tutur yang digunakan dalam menyederhanakan pengertian atau definisi, misalnya “bail out” itu ibarat seseorang yang utangnya kepada seseorang dibayari oleh orang lain yang tidak dikenalnya.”

Tindak perlokusi (*Perlocutionary act*), melakukan suatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tindak perlokusi menghasilkan efek atau hasil. yaitu hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ungkapan itu pada pendengar, sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat itu. Tanggapan tersebut tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga berbentuk tindakan atau perbuatan. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Contoh: ‘Saya lapar’, yang dituturkan oleh si penutur menimbulkan efek kepada pendengar, yaitu dengan reaksi memberikan atau menawarkan makanan kepada penutur. Pada kalimat “It is hot here”, berdasarkan konteks tertentu (udara panas, berada dalam ruangan yang jendela dan pintu tertutup semua, misalnya), maka hasil yang akan diperoleh adalah jendela akan dibuka lebar-lebar atau tidak dihiraukan sama sekali.

C. Tindak Tutur Searle

Searle (dalam Rahardi, 2005: 35-36) menyatakan bahwa dalam praktiknya terdapat tiga macam tindak tutur antara lain: (1) tindak lokusioner, (2) tindak ilokusioner, (3) tindak perlokusi. Tindak lokusioner adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu. Kalimat ini dapat disebut sebagai *the act of saying something*. Dalam lokusioner tidak dipermasalahakan maksud dan fungsi tuturan yang disampaikan maksud dan fungsi tuturan yang disampaikan oleh si penutur. Jadi, tuturan “tanganku gatal” misalnya, semata-mata hanya dimaksudkan memberitahukan si mitra tutur bahwa pada saat dimunculkannya tuturan itu tangan penutur sedang dalam keadaan gatal.

Sedangkan menurut Malmkjer (2005), jika Austin membagi tiga tindak tutur, Searle membaginya menjadi 4 tindak tutur. Dalam tindak lokusioner khususnya, Austin mem- baginya menjadi tiga, sedangkan Searle membaginya menjadi dua, yaitu: Tindak ujar (*uTindak tuturerance act*), yaitu mengujarkan kata (*morfem kalimat*). Tindak tutur ini mencakup dua tindak tutur lokusi dari Austin. Tindak preposisi (*prepositional act*), yaitu merujuk dan memprediksi. Tindak ini merupakan tindak lokusi ketiga pada Austin. Tindak tutur jenis inilah yang kemudian akan diekspresikan melalui tindak ilokusi dan perlokusi.

Tindak ilokusioner adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu pula. Tindak tutur ini dapat dikatakan sebagai *the act of doing something*. Tuturan “tanganku gatal” diucapkan penutur bukan semata-mata dimaksudkan untuk memberitahukan mitra tutur bahwa pada saat dituturkannya tuturan tersebut, rasa gatal sedang bersarang pada tangan penutur, namun lebih dari itu bahwa penutur menginginkan mitra tutur melakukan tindakan tertentu berkaitan dengan rasa gatal pada tangan penutur, misalnya mitra tutur mengambil balsem.

Selanjutnya, Searle (dalam Rahardi, 2005:36) menggolongkan tindak tutur ilokusi itu ke dalam lima macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi komunikatif. Kelima macam bentuk tuturan yang menunjukkan fungsi itu dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Asertif (Assertives),

yakni bentuk tuturan yang mengikat penutur pada ke- benaran proposisi yang diungkapkan, misalnya menya- takan (stating), menyarankan (suggesting), menbual (boasting), mengeluh (complaining), dan mengklaim (claiming).

2. Direktif (Directives),

yakni bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturannya untuk membuat pengaruh agar si mitra tutur melakukan tindakan, misalnya, memesan (orderin), memerintah (commanding), memohon (requesting), menasehati (advising), dan merekomendasi (recommending).

3. Ekspresif (Expressives)

adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan, misalnya berterima kasih (thanking), memberi selamat (congratulating), meminta maaf (par- doning), menyalahkan (blaming), memuji (praising), berbelasungkawa (condoling).

4. Komisif (Commissives),

yakni bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran, misalnya berjanji (promising), bersumpah (vowing), dan menawarkan sesuatu (offering)

5. Deklarasi (Declarations),

yaitu bentuk tuturan yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan, misalnya berpasrah (resigning), memecat (dismissing), menbaptis (chistening), memberi nama (naming), mengangkat

(appointing), mengucilkan (excommunicating), dan menghukum (sentencing).

Tindakan perlokusi adalah tindak menumbuh pengaruh (effect) kepada mitra tutur. Tindak tutur ini disebut dengan the act of affecting someone. Tuturan “tanganku gatal”, misalnya dapat digunakan untuk menumbuhkan pengaruh (effect) rasa takut kepada mitra tutur. Rasa takut itu muncul, misalnya, karena si penutur itu berprofesi sebagai seseorang tukang pukul yang pada kesehariannya sangat erat dengan kegiatan memukul dan melukai orang lain.

D. Strategi Tindak Tutur

Dalam komunikasi satu fungsi dapat dinyatakan atau diutarakan melalui berbagai bentuk ujaran. Untuk maksud atau fungsi “menyuruh”, misalnya, menurut Blum-Kulka (1987) (lihat Gunarwan, 1993: dapat diungkapkan dengan menggunakan berbagai ujaran sebagai berikut.

- (1) Kalimat bermodus imperatif :Meja ini mempersempit jalan laluan.
- (2) Performatif eksplisit : Bisa minta tolong menggesarkan meja.
- (3) Performatif berpagar : Bisa tidak kita pindahkan meja in?
- (4) Pernyataan keharusan : Anda harus memindahkan meja ini.
- (5) Pernyataan keinginan : Aku ingin memindahkan meja ini.
- (6) Rumusan saran :Bagaimana ya kalau meja ini dipindahkan.
- (7) Persiapan pertanyaan :Anda bisa memindahkan meja ini?
- (8) Isyarat : Meja ini harus dipindahkan karena menghalangi jalan laluan.
- (9) Isyarat halus : Jalan laluan ini kok sempit ya?

Dari sembilan bentuk ujaran tersebut diperoleh sembilan tindak tutur yang berbeda-beda derajat kelangsungannya dalam menyampaikan maksud ‘menyuruh memindahkan meja’ itu. hal ini berkaitan dengan tindak tutur langsung (tindak tutur-I) dan tindak

tutur tidak langsung (tindak tutur-tl). derajat kelangsungan tindak tutur dapat diukur berdasarkan “jarak tempuh” antara titik ilokusi (di benak p) ke titik tujuan ilokusi (di benak mt). derajat kelangsungan dapat pula diukur berdasarkan kejelasan pragmatisnya: makin jelas maksud ujaran makin langsunglah ujaran itu, dan sebaliknya. dari kesembilan bentuk ujaran tersebut, yang paling samar-samar maksudnya ialah bentuk ujaran (9), berupa isyarat halus. karena kata “meja” sama sekali tidak disebutkan oleh p dalam ujaran (9), maka mt harus mencari-cari konteks yang relevan untuk dapat menangkap maksud p.

1. Tindak Tutur Langsung Vs Tindak Tutur Tidak Langsung

Secara formal, berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), kalimat Tanya (interogatif), dan kalimat perintah (imperatif). Secara konvensional kalimat berita digunakan untuk memberitakan sesuatu (informasi), kalimat Tanya untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan. Bila kalimat berita difungsikan secara konvensional untuk mengatakan sesuatu, kalimat Tanya untuk bertanya, dan kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, atau memohon, dsb, tindak tutur yang terbentuk adalah tindak tutur langsung (*direct speech act*). Dari uraian di atas skema penggunaan modus kalimat dalam kaitannya dengan kelangsungan tindak tutur. Selain itu juga menunjukkan bahwa kalimat perintah tidak dapat digunakan untuk mengutarakan tuturan secara tidak langsung. dapat digambarkan sebagai berikut :

Modus	Tindak Tutur	
	Langsung	Tidak Langsung
Berita	Menberitakan	Menyuruh
Tanya	Bertanya	Menyuruh
Perinintah	Memerintah	-

Selain tindak tutur-l dan tindak tutur-tl, p dapat juga menggunakan tindak tutur harafiah (tindak tutur-h) atau tindak tutur tidak harafiah (tindak tutur-th) di dalam mengutarakan maksudnya. jika kedua hal itu, kelangsungan dan keharafiaan ujaran, digabungkan maka akan didapatkan empat macam ujaran, yaitu:

- (1) Tindak tutur-lh: “buka mulut”, misalnya diucapkan oleh dokter gigi kepada pasiennya.
- (2) Tindak tutur-lth: “tutup mulut”, misalnya diucapkan oleh seseorang yang jengkel kepada mt-nya yang selalu “cerewet”.
- (3) Tindak tutur-tlh : “bagaimana kalau mulutnya dibuka?”, misalnya diucapkan oleh dokter gigi kepada pasien yang masih kecil agar anak itu tidak takut.
- (4) Tindak tutur-tlth : “untuk menjaga rahasia, lebih baik jika kita semua sepakat menutup mulut kita masing- masing”, misalnya diucapkan oleh p yang mengajak mt-nya untuk tidak membuka rahasia.

Dengan demikian, secara ringkas, berdasarkan uraian dan contoh-contoh di atas dapat dicatat ada delapan tindak tutur sebagai berikut (bandingkan wijana, 1996: 36).

- (1) tindak tutur langsung (tindak tutur-l)
- (2) tindak tutur tidak langsung (tindak tutur-tl)
- (3) tindak tutur harafiah (tindak tutur-h)
- (4) tindak tutur tidak harafiah (tindak tutur-th)
- (5) tindak tutur langsung harafiah (tindak tutur-lh)
- (6) tindak tutur tidak langsung harafiah (tindak tutur-tlh)
- (7) tindak tutur langsung tidak harafiah (tindak tutur-lth)\
- (8) Tindak tutur tidak langsung tidak harafiah (tindak tutur-tlth) apabila seseorang menggunakan bahasa, maka ada 3 jenis tindakan atau tindak tutur (selanjutnya disingkat tindak tutur), yaitu Lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Hal ini sejalan

dengan pendapat Austin (1962) yang melihat adanya tiga jenis tindak ujar, yaitu tindak lokusi (melakukan tindakan mengatakan sesuatu), tindak ilokusi (melakukan tindakan dalam mengatakan sesuatu), dan tindak perlokusi (melakukan tindakan dengan mengatakan sesuatu).

BAB IV

PERISTIWA TUTUR

Peristiwa tutur (Inggris: *speech event*) adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, dan situasi tertentu.

Menurut penjelasan di atas, peristiwa tutur terjadi pada tempat, waktu, dan situasi tertentu. Berarti suatu peristiwa tutur itu terjadi pada situasi tutur tertentu. Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Di dalam komunikasi, tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi tutur merupakan sebabnya. Di dalam sebuah tuturan tidak senantiasa merupakan representasi langsung elemen maknaunsur-unsurnya. Pada kenyataannya terjadi bermacam-macam maksud dapatdiekspresi dengan sebuah tuturan, atau sebaliknya, bermacam-macam tuturan dapat mengungkapkan sebuah maksud. Situasi tutur berbeda dengan peristiwa tutur. Menurut Hymes situasi tidak murni komunikatif dan tidak mengatur adanya aturan bicara, tetapi mengacu pada konteks yang menghasilkan aturan bicara. Sementara itu, peristiwa tutur terjadi dalam satu situasi tutur dan peristiwa itu mengandung satu atau lebih tindak tutur.

A. Aspek–Aspek Situasi Tutur

Leech dalam bukunya yang berjudul *principles of pragmatics* (1983: 13-14) mengungkapkan bahwa *pragmatics studies meaning in relation to speech situation*. Pragmatik berbeda dengan semantik, pragmatik menyangkut makna dalam hubungan pada sebuah situasi tutur. Leech mengungkapkan sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan dalam sebuah situasi tutur. Berikut akan disajikan aspek- aspek situasi tutur menurut Leech.

1. Penutur dan Lawan tutur

Penutur dan lawan tutur ini mencakup penulis dan pembaca dalam wacana tulis. Aspek–aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan tingkat keakraban.

2. Konteks Tuturan

Konteks dapat dimengerti dengan beragam cara. Konteks pada dasarnya merupakan segala latar belakang penge- tahuan, yakni antara penutur dan mitratutur yang merupakan kontribusi interpretasi mitratutur dari apa yang dimaksudkan oleh penutur dari sebuah tuturan yang diberikan dan dipahami bersama.

3. Tujuan Tuturan

Tujuan atau fungsi sebuah tuturan lebih berbicara tentang maksud tuturan tersebut, atau maksud penutur dalam tuturannya. Dalam pragmatik, berbicara merupakan akti- vitas yang berorientasi pada tujuan.

4. Tuturan Berupa Perbuatan /Tindak Tutur Ilokusi

Pragmatik menguraikan tindakan- tindakan verbal atau performansi-performansi yang berlangsung dalam situasi-situasi khusus dalam waktu tertentu. Dalam hal ini pragmatik menggarap bahasa dalam tingkatan yang lebih konkret daripada tata bahasa. Ucapan dianggap sebagai suatu bentuk kegiatan ; suatu tindak ujaran.

5. Tuturan sebagai Suatu Produk Tindak Verbal

Tuturan adalah elemen bahasa yang maknanya kita pelajari dalam pragmatik. Tuturan yang dipakai dalam pragmatik mengacu pada produk suatu tindak verbal dan bukan hanya kepada tindak verbal itu sendiri. Sebenarnya kita dapat mendeskripsikan bahwa pragmatik merupakan ilmu yang menelaah makna tuturan, sedangkan semantik merupakan ilmu yang menelaah tentang makna kalimat.

Kelima aspek di atas merupakan hal yang harus diperhatikan oleh penutur pada peristiwa tutur tertentu.

B. Aspek Mitra Tutur dalam Tindak tutur

Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur selalu ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu. Hubungan antara anak dengan orang atau sekelompok orang tersebut memiliki tingkat kedekatan yang berbeda-beda.

Demikian juga dengan status sosial anak dibandingkan dengan mitra tutur yang dihadapinya pun berbeda-beda, tingkat kedekatan hubungan antara anak dengan mitra tutur dan status sosial anak dibandingkan dengan mitra tutur tersebut berpengaruh terhadap strategi yang digunakan oleh anak dalam bertutur (Rusminto, 2010: 103)

C. Aspek Kedekatan Hubungan

Kedekatan hubungan yang dimaksud berkaitan dengan tingkat keakraban dan kemesraan hubungan antara penutur dan mitra tutur yang dihadapinya. Untuk mempermudah pembahasan, kedekatan hubungan dalam kajian ini diklasifikasikan dalam empat klasifikasi, yaitu klasifikasi hubungan sangat dekat, klasifikasi hubungan cukup dekat, klasifikasi hubungan cukup jauh, dan klasifikasi hubungan sangat jauh (Rusminto, 2010: 103).

D. Aspek Status Sosial

Status sosial yang dimaksud adalah kedudukan dan peran individu dalam keluarga atau lingkungan sekitar dibandingkan dengan mitra tuturnya. di samping itu, aspek status sosial ini pada kasus tertentu, juga dikaitkan dengan usia anak dibandingkan dengan mitra tuturnya. Sementara itu, unsur jenis kelamin, kepribadian, dan kekuasaan tidak dipertimbangkan karena tidak cukup relevan untuk dikaitkan dengan kajian dalam kajian ini (Rusminto, 2010: 127).

BAB V

PENDIDIKAN BAHASA SANTUN

A. Pendidikan Bahasa Santun

Pembinaan bahasa santun di sekolah berdasarkan pada visi sekolah tentang kesantunan bersikap yang salah satunya adalah kesantunan berbahasa. Bahasa santun merupakan perilaku berbahasa yang sesuai dengan nilai dan norma sosial dan agama. Bahasa dalam kaitan ini dipandang dari segi pengetahuan dan keterampilan fungsional bagi manusia. Pengetahuan dan keterampilan fungsional adalah salah satu bagian dari orientasi pendidikan umum, dimana pendidikan umum memberikan keterampilan berbahasa yang difungsikan sebagai sarana interaksi dan komunikasi sosial antarmanusia. Dalam masyarakat yang memiliki norma dan tata nilai, bahasa santun merupakan suatu tuntunan yang tidak biasa diabaikan.

Visi sebagai pandangan jauh ke depan merupakan titik tonggak dari perubahan yang hendak diwujudkan dimasa depan atau awal dari berbagai perubahan besar (Tilaar,1997:13). Sekolah menyadari arti penting bersikap bagi orang yang akan menghuni masa depan, yaitu anak-anak atau remaja. Visi sebagai produk akumulasi berpikir dan kesadaran terhadap masa lalu, kini, dan masa depanmengimplikasikan wawasan yang luas dan jauh bahwa masa depan yang dipenuhi dengan berbagai krisis mengharuskan

konsistensi dan sikap orang terhadap keyakinan dan nilai yang dipegangnya.

Konsistensi sikap terhadap nilai yang merupakan produk dari manusia yang memiliki perasaan (hati) dan penalaran (akal) melahirkan sikap ilmiah sebagai *hilmun*, yaitu kesanggupan atau kemampuan untuk menolak argumentasi orang bodoh dengan bahasa yang santun. Wara' yaitu tidak rakus, rendah hati yang mampu membentengi dirinya dari perbuatan maksiat, dan *husnul khuluk*, yaitu berakhlak baik sehingga bisa hidup di antara manusia (Dahlan dalam Mulyana, 1999:14).

Dipandang dari aspek tujuan pendidikan umum, pengembangan visi sekolah merupakan tujuan-tujuan yang ingin dilahirkan oleh pendidikan umum. Aspek religiusitas, aspek keunggulan prestasi, aspek kesadaran terhadap IPTEK, dan kesantunan bersikap merupakan sikap-sikap yang seyogianya terwujud dalam perilaku remaja.

Religiusitas adalah ide-ide, pikiran-pikiran, dan konsep-konsep yang lahir dari religi atau agama (Islam) yang membentuk perilaku. Aspek religiusitas dalam visi mengisyaratkan pemahaman yang mendalam mengenai mendasari kehidupan manusia. Dalam pendidikan di Indonesia, agama dijadikan sebagai acuan normatif yang ditandai dengan dimasukkannya unsur iman dan takwa dalam tujuan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah yang memiliki visi religius pada dasarnya merupakan implementasi dari tujuan pendidikan nasional di atas.

Dalam pendidikan umum, agama merupakan sumber nilai yang menjadi acuan dalam pencarian makna manusia sebagai idealitas yang hendak diwujudkan. Sebagai sumber, maka nilai dan norma agama merupakan bagian terpenting dalam pendidikan umum, karena wujud manusia yang diharapkan adalah manusia yang mampu berkomunikasi dengan sesama manusia, dirinya sendiri, alam lingkungan dan dengan Tuhannya. Melihat aspek religius dalam visi sekolah dapat dinyatakan bahwa religiusitas yang

dimaksud adalah religiusitas yang menjadi salah satu sumber nilai dalam pendidikan umum.

Aspek keunggulan prestasi, yaitu visi sekolah untuk mewujudkan manusia-manusia yang dapat merahi keunggulan dalam prestasi. Manusia unggul adalah manusia yang memiliki kelebihan dan keutamaan, khususnya dalam prestasi kehidupan. Manusia semacam ini pada dasarnya adalah manusia yang dapat hidup dan memberi warna pada masa yang akan datang. Masa depan memiliki karakter yang berbeda dengan masa kini. Era informasi dan globalisasi menuntut manusia yang tajam antar negara akan memacu kompetensi antar individu. Dalam kondisi ini, hanya manusia yang unggul yang dapat bertahan dan memimpin dunia. Dari segi ini, pendidikan umum mengembangkan pendidikan yang berwawasan luas dan berorientasi ke masa depan. Karena itu aspek keunggulan prestasi merupakan bagian dari fungsi pendidikan umum.

Aspek kesadaran terhadap IPTEK berkaitan dengan penguasaan dan sikap terhadap IPTEK. Manusia sebagai subjek IPTEK dituntut untuk menguasai dan mengembangkannya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. IPTEK adalah sarana tujuan bagi manusia. Karena itu diperlukan kesadaran manusia akan sebagai subjek dihadapan IPTEK. IPTEK semata-mata adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan tugas manusia di dunia sebagai hamba Allah dan khalifa-Nya.

Kesadaran terhadap IPTEK akan mengimplikasikan sikap terhadap lingkungan manusia dan alam. Kerusakan lingkungan sebagian besar karena rendahnya kesadaran manusia terhadap IPTEK. Demikian pula, dampak IPTEK berupa *dehumanisasi* nilai-nilai luhur dan kodrati manusia bisa dihindarkan. IPTEK tidak dipandang sebagai kekuatan (*power*), akan tetapi pendidikanlah yang menjadi kekuatan.

Kesantunan bersikap yang dicantumkan dalam visi sekolah mengisyaratkan pelestarian nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki.

Manusia bernilai adalah manusia yang memiliki sikap yang santun. Kesantunan adalah buah dari kesadaran manusia terhadap posisinya ditengah-tengah alam dan manusia berhadapan dengan Allah yang maha kuasa. Manusia yang menyadari posisinya yang lemah diadapan Allah memberikan kesadaran akan keharusan manusia untuk bersikap rendah hati di hadapan Allah dan ciptaa-Nya. Sikap sombong, arogan, dan takabur adalah sikap hidup manusia yang tidak sadar akan posisinya. Karena itu, kesantunan merupakan nilai yang dapat melestarikan kemanusiaannya manusia. Dilihat dari dimensi nilai, maka visi kesantunan merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam tujuan umum. Dengan demikian, melihat aspek-aspek yang terkandung dalam visi tersebut, dilihat dari segi tugas, fungsi dan tujuannya dimasukkan kedalam ketegori pendidikan umum.

Berbahasa santun merupakan salah satu ciri dari manusia yang berkepribadian.kepribadian manusia adalah tujuan yang hendak dicapai pendidikan umum. Manusia yang berkpribadian adalah manusia yang utuh (*kaffah*), yakni bersatunya niat, ucap, pikir, perilaku dan tujuannya direalisasikan dalam hidup bermasyarakat yang diperhadapkan kepada Allah SWT, (Dahlan, 1998 : 14). Sementara Soelaeman (1988 : 147) menyatakan dalam sentuhan-sentuhan bahasa fenomenologis dalam terminologi *pribadi religius*. Pribadi religius berlangsung di dunia insan itu. Dalam dunia yang religius itu, pribadi yang bersangkutan menempatkan diri berhadapan, berakraba dengan sang pencipta, pada sosok yang khas, kekhasannya itu tampak pada penampilan badaniayahnya. Komunikasinya dengan manusia, dengan lingkungannya, dengan dirinya dan tentu saja dengan Sang Pencipta serta dalam pengalaman kewaktuannya, dulu, kini, dan kelak.

Pembinaan berbahasa santun bukan sekedar proses belajar mengajar tentang bahasa santun, tetapi upaya memahami, menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai kesantunan dalam kehidupan. Proses pendidikan semacam itu bukan hanya

mengarahkan atau menyantun ranah kognitif, tetapi membina *kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik* secara keseluruhan dan terpadu dalam suasana yang layak terjadinya pendidikan. Proses tersebut melibatkan unsur emosi, penalaran, dan keterampilan secara serempak dalam suatu komunikasi edukatif. Melihat proses pendidikan semacam itu, tampak bahwa pendidikan tersebut bukanlah proses pengembangan pengetahuan, tetapi penghayatan dan pemaknaan yang menjadi siri dari proses pendidikan umum.

Dalam penggunaan bahasa santun isi atau *content* pendidikannya adalah nilai-nilai yang dipegang secara kokoh oleh masyarakat, yaitu nilai-nilai: a) **Budaya**, yakni nilai-nilai yang muncul dalam hidup bersama manusia dalam bentuk hal-hal material maupun rohani, ide-ide, cita-cita, prinsip-prinsip dasar sikap hidup manusia, (Mardiatmaja dalam Hartoko, 1985 : 40). Bahasa yang mengandung dan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat penuturnya sering disebut dengan bahasa santun. b) **Agama**, yakni nilai-nilai abadi yang diturunkan Allah kepada manusia melalui utusan-Nya berisi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia dalam rangka mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat (Shihab, 1985 : 213). Bahasa yang mengandung nilai-nilai agama berarti bahasa yang sesuai dengan tata aturan agama. Bahasa seperti itu akan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat penuturnya, karena sifat agama memberikan nilai-nilai dasar bagi manusia dimanapun dan kapanpun manusia berada. Pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka norma yang digunakan masyarakat merujuk pada nilai-nilai keislaman.

Isi nilai yang dikembangkan dalam pembinaan berbahasa santun berkaitan dengan bahasa sebagai ciri berpikir teratur, sebab bahasa yang santun itu menandakan berpikir yang benar dan teratur. Berbahasa santun di aplikasikan juga dalam berbahasa yang runtun dan tersusun atau sistematis; tidak kacau dan ngawur. Sehingga dengan demikian akan terwujud kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Aspek tanggung jawab merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam berbahasa santun. karena itu, bahasa santun terkait dengan sikap manusia yang tidak terlepas dari tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesamanya, maupun tanggung jawab kepada Tuhan. Implikasinya menurut Dahlan (2001 : 6) adalah manusia itu harus menyaring ucapannya; tidak asal berbunyi. Dalam kaitan dengan isi nilai bahasa, maka nilai-nilai kesopanan sebagai implikasi dari ajaran agama (akhlak) menjadi ukuran dalam menilai kesantunan berbahasa. Dengan demikian berbahasa santun merupakan salah satu bagian dari akhlak islam.

Berbahasa santun merupakan proses pembelajaran yang bukan hanya mengajarkan kosakata dan kalimat bahasa yang santun, tetapi menuntut penghayatan terhadap norma yang mendasarinya. Bahasa santun menuntut gerak isyarat (*gesture*, misalnya : Sunda-rengkuh) dan mimik yang sesuai dengan kosakata atau kalimat yang diucapkannya. Seseorang dapat melakukan kesantunan semacam itu, manakala telah terjadi penghayatan yang mendalam terhadap nilai dan norma yang melingkunginya. Proses penghayatan bukan hanya melibatkan pikiran saja, tetapi juga perasaan-perasaan, sehingga nuasa berbahasa dapat dihayati dan dialaminya dengan sempurna. Proses pendidikan seperti itu, bukanlah proses transformasi pengetahuan, melainkan penanaman, penghayatan, pertimbangan, dan aktualisasi nilai-nilai. Melihat pendidikan yang sarat dengan proses-proses internalisasi seperti itu, maka pendidikan tersebut merupakan ciri dari proses pendidikan umum.

Berbahasa santun pada dasarnya adalah keterampilan yang merupakan akumulasi dari penghayatan terhadap nilai, atau dengan kata lain adalah bentuk tingkah laku yang telah melalui proses penghayatan dan pemaknaan terhadap nilai. Sebagai bahasa, kesantunan itu harus dilaksanakan dalam kegiatan sehari-sehari dalam konteks komunikasi sosial. Karena itu, bahasa santun dididikan untuk dilaksanakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, pembinaan bahasa santun adalah

pembelajaran bahasa yang memiliki kegunaan praktis, yaitu kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran semacam ini merupakan pembelajaran fungsional atau *learning to do* yang menjadi salah satu pilar pendidikan umum.

Pengembangan berbahasa santun menuntut wawasan yang luas mengenai norma dan nilai yang digunakan penutur dan pendengar, di samping pengetahuan umum kebahasaan. Di sini pembinaan bahasa santun sebagai pendidikan umum dididikan dalam rangka mengembangkan pengetahuan yang luas bagi seseorang, sehingga pendidikan umum berfungsi untuk mendidik manusia yang memiliki kemampuan untuk mengetahui (*learning to know*) banyak hal. *Learning to know* merupakan salah satu pilar pendidikan umum.

Sebagai sarana untuk berkomunikasi antarmanusia, bahasa santun pada dasarnya adalah bahasa yang harus digunakan dalam komunikasi sehari-hari, bukan hanya bahasa yang bersifat teoretis semata. Kegunaan pragmatis bahasa ini menunjukkan bahwa bahasa santun bukan hanya dipandang sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan teknis yang berimplikasi pada status dan kedudukan penuturnya. Seorang penutur yang santun akan menempatkan dirinya pada posisi yang baik dan disenangi di tengah masyarakatnya. Karena itu, pembinaan bahasa santun diarahkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan umum pengetahuan dan keterampilan semacam itu merupakan implementasi dari pilar pendidikan umum sebagai *learning to be*.

Bahasa santun menjadi ciri manusia yang memahami dan menghayati nilai-nilai budaya dan agama. Orang yang berbahasa santun akan mampu menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat; sebagai anggota masyarakat yang baik dan memberi manfaat bagi lingkungannya, adalah pembelajaran dalam rangka mencapai kehidupan bersama yang harmonis dalam masyarakat atau *learning to live together* atau belajar yang diharamkan untuk hidup bersama dalam masyarakat, mengisyaratkan bahwa

pendidikan itu memberi makna dan manfaat nyata bagi kehidupan sosial masyarakat.

Masyarakat yang teratur, tertib, dan harmonis merupakan harapan setiap anggota masyarakat. Harapan masyarakat itu juga yang menjadi harapan pendidikan umum, sebab pendidikan pada hakikatnya adalah refleksi dari ide-ide dan keinginan masyarakatnya. Padanan yang lebih dekat dan lebih luas dari masyarakat yang dicita-citakan itu dalam pandangan islam disebut *baldah thaiyyiban wa rabbun ghafur*, yaitu masyarakat yang berada di negeri yang baik dan bernaung dibawah pengampunan dan perlindungan Tuhan.

Melihat visi dan misi berbahasa santun di sekolah dalam perseptif pendidikan umum merupakan gambaran dari tujuan dan peran pendidikan umum. Tetapi dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk merealisasikan visi-misi tersebut masih jauh dari gambaran implementasi pendidikan umum. Bahasa santun sebagai pendidikan umum belum tampil dalam proses pendidikan di sekolah. Padahal bahasa santun sebagai pendidikan umum menuntut adanya proses pembelajaran yang mengarah kepada pembiasaan dan penciptaan perubahan tingkah laku.

Berbahasa santun berkaitan dengan pengetahuan, penghayatan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan bahasa santun merupakan tugas guru bahasa indonesia dan guru pendidikan agama, sedangkan tugas sekolah mempersiapkan upaya-upaya dalam proses penghayatan, keterampilan dan sikap. Tetapi kenyataan itu hampir tidak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sekolah dalam pembinaan pendidikan umum baru pada tahap ide dan harapan yang masih bersifat normatif dan abstrak, belum sampai ke tingkat aktualisasi.

Dari segi kurikulum bahasa santun sebagai pendidikan umum tidak ditampilkan secara ekplisit dalam kurikulum sekolah. Dalam kurikulum bahasa indonesia dan pendidikan agama, bahasa santun merupakan kurikulum yang tidak eksplisit (*hidden curriculum*) yang dalam praktiknya diserahkan sepenuhnya kepada guru. Ada

sebagian guru yang mampu menangkap dan mau melaksanakannya, dan ada pula yang guru yang tidak melaksanakannya.

Dilihat dari segi proses, maka pengembangan bahasa santun sebagai pendidikan umum tidak tampak dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi tampak dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi tampak dalam komunikasi personal guru dengan siswa. Tidak bisa dipungkiri bahwa komunikasi guru dengan siswa didalam maupun diluar kelas merupakan proses pendidikan, bahkan mungkin komunikasi diluar kelas yang bersifat informal terjadi secara efektif melalui keteladanan sebagai alat pendidikannya. Dalam pendidikan umum, keteladanan dipandang sebagai upaya pendidikan yang sesuai terutama untuk penanaman dan pengembangan nilai-nilai.

Proses pengembangan bahasa santun sebagai pendidikan umum memerlukan suasana atau iklim sekolah yang kondusif dan menunjang terjadinya proses internalisasi nilai-nilai sehingga remaja dapat larut dalam suasana. Dengan demikian, nilai-nilai yang dididikkan dapat terhayati secara mendalam dan mampu melahirkan kesadaran pada diri remaja sehingga mendorong mereka untuk mampu mengaktualisasikan dalam bentuk perilaku. Upaya menciptakan iklim pendidikan untuk pengembangan bahasa santun sebagai pendidikan umum secara normatif telah diletakkan dalam visi sekolah. Tetapi upaya konkret dalam proses belajar mengajar di dalam kelas belum tampak.

Kesopana suasana sekolah meupayakan melalui masjid yang diperankan sebagai pusat nilai yang memancarkan iklim religius. Secara faktual upaya ini berpengaruh terutama memberikan nuansa agama terhadap berbahasa santun dalam bentuk pengayaan kosakata santun yang diambil dari istilah-istilah islam. Suasana religus ditampilkan pula melalui busana yang dikenakan siswa, yaitu jilbab bagi perempuan dan baju takwa bagi laki-laki pada hari jumat dan dianjurkan pada hari-hari lain. Dalam pembinaan akhlak remaja, cara berpakaian merupakan salah satu upaya pendidikan

nilai yang dipandang dapat mendorong remaja untuk berperilaku baik dan menahan mereka untuk menghindari perilaku buruk. Bagi pembinaan bahasa santun sebagai pendidikan umum, cara berpakaian remaja semacam itu dapat menjadikan iklim yang menunjang pengembangan bahasa santun serta mendorong untuk membiasakan berbahasa santun dan menghindari berbahasa tidak santun.

Dilihat dari segi materi, pengembangan bahasa santun sebagai pendidikan umum belum tampil di sekolah, karena tidak terdapat dalam kurikulum. Karena itu, pengetahuan dan keterampilan berbahasa santun diperoleh remaja, diperoleh melalui apa yang didengar dan dilihat dari orang-orang yang berbahasa santun, baik siswa maupun guru.

Program-program ekstrakurikuler disekolah pada umumnya berisi pengembangan pendidikan umum, seperti keagamaan, kepramukaan dan sebagainya. Sedangkan untuk materi bahasa santun dalam program ini juga menjadi *hidden* kurikulum, kecuali pada kegiatan keagamaan di mesjid yang berkaitan dengan pengembangan bahasa santun melalui program-program pembinaan akhlak.

B. Peluang dan Tantangan Program Berbahasa Santun di Sekolah

1. Peluang

Faktor-faktor penunjang yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan berbahasa santun di sekolah adalah :

Adanya visi dan misi sekolah sebagai acuan normatif bagi sekolah dalam mengembangkan program-programnya, terutama program yang berkaitan dengan pengembangan religiusitas siswa. Aspek religiusitas dalam misi sekolah melalui pembinaan akhlak, karena bahasa santun merupakan bagian dari kajian akhlak.

Adanya kesediaan kepala sekolah sebagai pengambil keputusan di tingkat sekolah yang konsisten mempersiapkan aturan, program dan sarana bagi pengembangan nilai moral. Khususnya berbahasa santun;

Adanya kesamaan visi di kalangan sekolah (guru, karyawan, siswa) yang dibuktikan dengan kesiapan guru, karyawan, dan siswa dalam melaksanakan berbagai program sekolah termasuk upaya-upaya guru dalam pembinaan berbahasa santun di sekolah.

Adanya sarana pembinaan moral siswa, baik kurikulum maupun sarana fisik seperti masjid, yang beberapa kegiatan menjadi ajang pembinaan bahasa santun di sekolah.

2. Tantangan

Di samping faktor peluang di atas, terdapat pula faktor-faktor tantangan dalam pelaksanaan pembinaan bahasa santun di sekolah, yaitu:

Visi dan misi dalam bentuk strategi yang berkaitan dengan pembinaan berbahasa santun belum tersedia, sehingga pembinaan bahasa di sekolah belum terfokus. Strategi yang berkaitan dengan pembinaan berbahasa santun dimasukkan ke dalam strategi pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, sekolah tidak memiliki momen yang tepat untuk mengembangkannya.

Pengaruh dari luar sekolah sangat besar karena sekolah terletak di tengah masyarakat perkotaan yang cenderung bersikap individualis. Siswa datang dari berbagai lingkungan sosial budaya yang beragam, termasuk keragaman, kebiasaan mereka dalam berbahasa, serta sebagai siswa bertempat tinggal jauh dari sekolah sehingga pada saat berangkat dan pulang sekolah bertemu dan berkomunikasi dengan beragam orang dan keragaman bahasanya.

Belum tersosialisasinya visi dan misi sekolah kepada orang tua dan masyarakat lingkungan sekolah, sehingga daya tunjang faktor

tersebut kepada pembinaan berbahasa santun di sekolah masih lemah.

Salah satu upaya pengembangan bahasa santun di sekolah adalah ditetapkan visi sekolah. Dalam visi tersebut terungkap tentang santun berperilaku. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan bersikap santun adalah berperilaku agamis, yakni apabila bertutur kata selalu benar, tepat sesuai dengan yang seharusnya, bermakna dan dapat menyejukkan hati. Perilaku tersebut merupakan ciri dari insan yang cerdas dan berakhlak karimah dalam kehidupan di masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan bahasa santun di sekolah dihadapkan kepada hambatan-hambatan yang datang dari pihak sekolah dan dari luar sekolah.

Hambatan yang datang dari dalam sekolah dalam pengembangan berbahasa santun, pada umumnya berkaitan dengan padatnya kurikulum dan tidak adanya program yang terfokus kepada pembinaan bahasa santun. Sedangkan pengaruh dari luar sekolah cukup besar dalam mempengaruhi tata krama berbahasa siswa. Misalnya, seorang siswa yang menjalin pertemanan dan keakraban dengan siswa yang berbahasa tidak santun cenderung mudah terpengaruh tidak santun, seringnya ia mendengar ungkapan-ungkapan tidak santun sehingga yang tidak santun itu menjadi biasa didengar dan akhirnya biasa diucapkan. Demikian pula, guru yang tidak sengaja mengucapkan kata-kata tidak santun kepada siswanya akan menjadi contoh yang tidak mendidik.

Faktor-faktor yang menjadi kesulitan dalam pembinaan berbahasa santun di sekolah akan di paparkan berikut ini.

- a. Kurang Perhatian Sekolah terhadap Pembinaan Berbahasa Santun.

Sekolah lebih banyak berorientasi kepada pencapaian target kurikulum yang harus selesai sesuai rencana. Akibatnya siswa dijejali dengan materi pengetahuan yang sangat padat. Guru di pacu

untuk menyampaikan materi sesuai program yang telah dituangkan di dalam kurikulum. Seolah-olah siswa dipaksa harus menerima apa adanya, apakah mampu atau tidak dengan muatan kurikulum yang telah diprogramkan pemerintah, apa lagi ada kepentingan-kepentingan yang di manfaatkan untuk kepentingan politik dalam pemerintah. Maka tidak mustahil terjadi penjejalan pengetahuan melalui kurikulum yang sangat padat, dan mengabaikan afeksi.

Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) merupakan harapan yang mesti dipenuhi dengan banyaknya siswa yang diterima dalam mengejar target UMPTN ini. Dari hal tersebut tampak bahwa sekolah hanya mementingkan ranah kognitif semata-mata dan mengabaikan ranah afektif. Tidak mustahil kata sebagian guru pada generasi mendatang akan terjadi indonesia yang penuh dengan orang-orang cerdas namun keropos, tidak memiliki sikap mental berperilaku santun. di satu pihak, kepintaran siswa merupakan kebanggaan bagi semua, namun pihak lain menganggap bahwa kesuksesan pelaksanaan program pendidikan itu, manakala anaknya cerdas, dan berperilaku santun dalam berkomunikasi.

Target mencapai NEM yang tinggi merupakan cita-cita semua lapisan, terutama sekolah, wali kelas, bidkurlum, guru dan siswa itu sendiri, bahkan orang tua pun sangat mengharapkan anaknya hebat, pintar dan memasuki PTN ternama. Bukti untuk mengejar NEM tinggi itu, dilakukan bimbingan tes diluar sekolah, belajar tambahan di sekolah, mendatangkan guru ke rumah, terutama guru bidag studi yang diebtanaskan. Tampaknya perhatian itu menggambarkan, bahwa bobot ranah kognitif lebih besar daripada afektif. Anak diarahkan agar menjadi manusia pintar saja. Walaupun moralnya rusak.

Berbahasa santun merupakan pemilihn tutur kata yang harus dibiasakan remaja dalam berkomunikasi sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah. Namun dalam pengembangan berbahasa santun diperlukan program yang lebih rinci dan muda diterapkan di sekolah. Pada saat ini sekolah

tidak memiliki program khusus sehingga situasi dan kondisi sekolah tidak memunculkan suasana yang khusus pula untuk itu. Slogan-slogan yang menciptakan situasi santun tidak terdapat di sekolah. Belum adanya keteladanan khusus dari guru mengenai pengembangan berbahasa santun. Demikian pula penerapan tata tertib sekolah sebagai sarana untuk menciptakan suasana, belum tampak diwujudkan. Tidak adanya pengembangan program khusus berbahasa santun di sekolah, menyebabkan hilangnya budaya berbahasa santun di kalangan remaja.

b. Keteladana Guru yang Belum Maksimal

Taatnya siswa hanya pada saat ada guru atau orang yang disegani saja, sedangkan apabila tidak ada, maka kebiasaan siswa tidak santun terulang kembali. Keseganan terhadap guru masih disebabkan karena kerasnya menerapkan disiplin, sehingga ketaatan maupun kesantunan anak terhadap guru yang bersangkutan, bukan karena dorongan kesadaran untuk hidup disiplin.

Keteladanan guru pengajar dalam disiplin dan berbahasa santun ternyata masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini terbukti ketika sekolah mewajibkan kepada siswa memakai pakaian seragam, sementara ada guru yang memakai pakaian bebas. Ketika ada anak yang ditegur, maka anak menjawab dengan jawaban yang tidak santun yakni ucapan yang agak kasar “guru pun tidak taat”. Kemudian saat guru menegur anak yang kesiangkan dengan ucapan “wah kamu kesiangkan tidak tahu waktu, yah!” Teguran ini dilakukan di depan para temannya, ada siswa yang menjawab. “diluar juga ada guru yang kesiangkan apa ditegur juga?” teguran kepada anak yang kepergok merokok di lingkungan sekolah, “Hei sini kamu, sambil di tarik dan dipegang kuduknya”, anak itu menjawab “Emang hanya saya saja yang merokok, guru juga ada yang merokok di sekolah, bahkan ada yang merokok dihadapan para siswa.

Penerapan disiplin dengan otoriter di sekolah masih sulit diterima oleh pra siswa, karena menurut pendapatnya, hal itu bisa mematikan kreativitas siswa, misalnya ketika guru mengajar

di kelas, siswa hendaknya duduk dengan rapi, menghadap hanya kedepan, tidak boleh bergerak, berbisik, dan kalau ada anak yang berbuat ulah saat guru mengajar, seperti ada siswa yang ngobrol, guru cepat tanggap, langsung bereaksi berkesan marah. “Hey kamu mau apa ini, mengganggu ya, kalau kamu mengganggu orang lain, ayo keluar, tunggu diluar”, anak itu menjawab dengan wajah merah, tertunduk malu, kemudian berucap “Mohon maaf atas kesalahan saya”. Mendengar ucapan remaja seperti itu membuat guru untuk memaafkannya, dan akhirnya remaja disuruh duduk kembali. Selanjutnya guru memberikan peringatan kepada semua remaja untuk bersungguh-sungguh dan giat mengikuti pelajaran, dan apabila ada teman lain yang berbuat kegaduhan dikels, maka sudah seharusnya kita mengingatkannya, dengan cara yang lebih baik, dan sopan. Setelah guru memberikan penjelasan kemudian meneruskannya kembali menyampaikan materi selanjutnya.

c. Pengaruh Siswa Pindahan yang Bermasalah

Siswa pindahan dari sekolah lain dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tidak sedikit disebabkan karena dipaksa harus pindah dari sekolah sebelumnya, karena nakal dan sebagainya. Hal ini sering kali menjadi masalah bagi sekolah yang bersangkutan. Pada umumnya siswa pindahan itu masuk sekolah pada catur wula kedua. Karena sekolah menganggap bahwa siswa telah mengalami orientasi di sekolah terdahulu. Padahal setiap sekolah memiliki visi, cara dan suasana tersendiri yang berbeda dengan sekolah lain. Kasus siswa pindahan dalam kaitannya dengan berbahasa santun antara lain kebiasaan siswa di sekolah lama yang berbeda dengan kebiasaan berbahasa di sekolah baru. Hal ini terjadi karena perbedaan budaya dan tradisi kebahasaan yang bersangkutan.

d. Kurikulum yang Padat

Muatan kurikulum hampir seluruhnya menitik beratkan kepada pengetahuan, anak dipacu supaya pintar, mampu memecahkan masalah, bersaing dengan siswa lain, guru menjejali tugas untuk dikerjakan siswa di rumah, orang tua masih kurang yakin tentang

kemampuan anak di sekolah. Kemudian disuruh mengikuti bimbingan belajar, dengan bayaran cukup tinggi. Target lolos UMPTN merupakan harapan yang paling diminati siswa, sekolah, dan orang tua.

Beberapa alasan siswa tidak santun di sekolah yang merupakan faktor kurikulum adalah karena sekolah memacu siswanya untuk menjadi orang berpengetahuan yang hebat. Siswa didorong untuk belajar sungguh-sungguh dan diskusi dengan teman sekelas, guru pengajar bidang study Ebtanas disuruh memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang kurang dengan tujuan agar Ebtanas mendapat NEM yang tinggi dan dapat memasuki ke perguruan tinggi negeri (PT) favorit. Gengsi sekolah cukup tinggi apabila para siswanya banyak memasuki PT Negeri.

Apabila melihat struktur kurikulum yang ada, berbahsa santun baru menjadi dampak tidak langsung (nurturant effect) dari mata pelajaran umum, seperti agama, dan pancasila. Kurikulum yang dikembangkan lebih dari 85 % berhubungan dengan aspek kognitif. Sehingga peluang untuk mengembangkan budaya berbahasa santun di sekolah menjadi sedikit sekali.

Kendatipun demikian, peluang untuk mengembangkan berbahasa santun sebenarnya masih terbuka dalam kurikulum terbaru karena kurikulum nasional menyediakan materi muatan lokal. Akan tetapi peluang itu belum disikapi dengan baik oleh sekolah untuk mengembangkan budaya santun. Sekolah lebih banyak berorientasi kepada pengembangan penalaran siswa dan terget kelulusan UMPTN. Dalam pengembangan kurikulum masih terikat oleh tradisi bahwa kurikulum itu harus seragam sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Dinas atau Departemen. Keberanian kepala sekolah dan guru untuk membuat terobosan dalam pengembangan kurikulum masih sangat rendah. Hal ini berkaitan dengan sikap sekolah yang cenderung senang pada rutinitas dan kemapaman, menghidarkan diri dari terobosan yang biasanya menuntut resiko kerja dan biaya.

e. Eksternal Sekolah

a. Keluarga

Salah satu faktor ketidaksantunan siswa disamping sekolah juga faktor keluarga. Bahkan faktor keluarga dinilai memberikan pengaruh yang lebih besar, karena waktu yang digunakan siswa disekolah relatif lebih sedikit dibandingkan dengan di lingkungan keluarga. Faktor keluarga yang memicu ketidaksantunan remaja antara lain minimnya perhatian orang tua. Intensitas komunikasi anak dengan orang tua pada sebagian remaja yang tidak santun ternyata sangat rendah.

Beberapa kasus anak yang tidak berbahasa santun ditemukan pola komunikasi orang tua anak yang tidak intensif, jaranganya pertemuan mereka dengan ibu-bapaknya di rumah karena kesibukan mereka. Anak berkembang sendiri tanpa pengarahan dan bimbingan yang memadai sebagaimana yang ia butuhkan. Dilihat dari segi materi, pada umumnya anak tersebut berasal dan datang dari keluarga yang berekonomi tinggi yang terbukti dari fasilitas yang dimiliki anak, seperti kendaraan dan sebagainya .

Bimbingan dan arahan orang tua siswa di rumah agar anak berbahasa santun merupakan faktor yang menentukan, karena peranan orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan pribadi anak. Lingkungan keluarga yang taat beragama memberikan warna kepada pembentukan pribadi anak.

b. Masyarakat

Selain pengaruh keluarga, lingkungan masyarakat memberikan pengaruh berbahasa tidak santun, terutama lingkungan tempat tinggal siswa. Lingkungan masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang ekonomi. Pekerjaan dan kebiasaan yang beraneka ragam cenderung menyediakan

lingkungan yang tidak baik dalam berbahasa bagi anak. Demikian pula teman sepermainan anak.

C. Strategi Pendidikan dalam Pengembangan Bahasa Santun (*Sofyan Sauri*)

1. Strategi Sekolah dalam Pengembangan Bahasa Santun

Berdasarkan kajian teoritis dan praktis yang ditemukan dilapangan, ditemukan strategi sekolah dalam pengembangan berbahasa santun. yang dimaksud dengan strategi sekolah adalah usaha atau cara-cara sekolah untuk mewujudkan iklim pendidikan yang layak bagi terjadinya proses pendidikan bahasa santun. strategi sekolah tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Berbahasa santun dimasukkan sebagai salah satu butir dalam tata tertib sekolah yang mengatur komunikasi guru, siswa, dan karyawan.
- b. Peningkatan disiplin guru, karyawan dan siswa dengan membiasakan untuk berbahasa santun di sekolah.
- c. Pemasangan plakat-plakat dan brosur-brosur yang berisi ajakan dan anjuran untuk membiasakan berbahasa santun bagi guru, siswa, dan karyawan sekolah, termasuk tamu yang berkunjung ke sekolah.
- d. Berbagai seleksi rangking, kenaikan kelas, kelulusan, dan pemilihan siswa teladang.
- e. Menjalin komunikasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat yang memberikan penekanan santun di sekolah, keluarga, dan masyarakat.
- f. Pemberian muatan kesantunan pada, berbagai mata pelajaran di sekolah yang dilakukan oleh semua guru bidang study.
- g. Pengetatan penerimaan guru, siswa dan karyawan sekolah yang baru maupun pindahan dengan memasukkan kriteria kesantunan sebagai salah satu bahan seleksi penerimaan.

Membudayakan teguran di kalangan warga sekolah kepada orang yang tidak berbahasa santun

2. Strategi Pembelajaran Bahasa Santun

Strategi yang dimaksud adalah pola umum kegiatan guru-siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mengingat pengembangan bahasa santun tidak secara eksplisit tercantum dalam kurikulum di sekolah, maka strategi belajar bahasa santun diformat pada suatu kegiatan belajar mengajar.

Empat strategi dasar tersebut pada belajar mengajar bahasa santun sebagai berikut:

- A. menetapkan tujuan pembelajaran bahasa santun berupa perubahan tingkah laku yang diharapkan, yaitu kemampuan dan sikap santun dalam berbahasa yang mencakup kemampuan menggunakan bahasa dan tingkah laku santun.

Tujuan pembelajaran bahasa santun terdiri atas:

- (1) siswa mampu mengatakan kosa kata yang santun dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari;
- (2) siswa mampu membahasakan kata-kata santun dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) menetapkan pedoman umum pembelajaran bahasa santun dalam proses belajar mengajar berbagai bidang studi.

Pedoman umum pembelajaran bahasa santun di dalam kelas adalah sebagai berikut:

- (a) guru semua bidang studi menggunakan bahasa pengantar dalam pelajarannya dengan menggunakan bahasa yang santun;
- (b) sedapat mungkin guru mengaitkan mata pelajarannya dengan nilai-nilai termasuk etika kesantunan;
- (c) guru menegur siswa yang menggunakan bahasa tidak santun dalam proses belajar mengajar;

- (d) guru mendorong siswa untuk menggunakan bahasa dan sikap santun.
- B. Menetapkan prosedur dan metode pembelajaran bahasa santun.
 - (a) membiasakan guru mengajar dengan menggunakan bahasa santun sebagai metode peniruan dan keteladanan;
 - (b) membiasakan siswa berbahasa santun;
 - (c) memberikan *reward* pada saat siswa berbahasa santun di kelas dalam bentuk pujian;
 - (d) memberikan kritik terhadap siswa yang menggunakan bahasa tidak santun di dalam kegiatan belajar mengajar.
- C. Menetapkan tolok ukur keberhasilan pembelajaran dalam bentuk tingkah laku berbahasa santun yang terdiri atas:
 - (a) pengetahuan tentang kosa kata dan kalimat-kalimat santun;
 - (b) keterampilan menggunakan berbahasa santun dalam berbagai situasi.

Strategi pembelajaran berbahasa santun secara operasional dapat dikemukakan seperti langkah-langkah berikut ini.

Langkah 1: Persiapan (*Pre-conditioning, readiness*)

Menyiapkan siswa untuk memasuki proses belajar mengajar yang mengandung nilai kesantunan dengan mempersiapkan fisik dan mental. Penyiapan fisik menyangkut penataan ruang sehingga layak untuk dijadikan tempat belajar. Penyiapan mental adalah kesiapan siswa secara psikologis untuk diajak kepada proses belajar mengajar.

Langkah 2: Pembukaan dan penciptaan iklim belajar

Memulai pembelajaran dengan cara memancing perhatian siswa memasuki suasana pembelajaran yang akan diciptakan. Dalam tahap ini guru mengemukakan kosa kata dan kalimat santun serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan disertai nada suara, dan gerak yang seyogyanya melekat dalam pembahasannya.

Langkah 3: Pengecekan iklim belajar

Melakukan pengecekan dalam proses belajar mengajar sebagai akibat komunikasi guru-siswa melalui penghayatan dan pengamatan terhadap suasana yang terjadi.

Langkah 4: Penguatan (*re-inforcement*)

Penguatan dapat dilakukan dengan pengulangan dan penekanan-penekanan pada bagian-bagian penting. Pengulangan dimaksud untuk memberikan daya dorong agar materi dapat dijadikan bagian yang fungsional bagi siswa sehingga penguasaan terhadap materi menjadi kebutuhan siswa.

Langkah 5: Evaluasi

Guru melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek pengetahuan, penghayatan dan perilaku siswa dalam hubungannya dengan berbahasa santun. Aspek penguasaan kosa kata, aspek penghayatan kosa kata sesuai dengan intonasi yang diperlukan, seperti *lentong*. Sedangkan aspek perilaku dilakukan dengan mengamati isyarat – isyarat dalam kesantunan berbahasa, seperti *rengkuh*.

Langkah 6: Penyimpulan dan penutup

Penyimpulan dapat dilakukan dengan cara tanya jawab antara guru-siswa. Jawaban siswa diarahkan untuk sampai kepada kesimpulan yang benar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

BAB VI

REPRESENTASI KESANTUNAN BERBAHASA

ANGGOTA LEGESLATIF

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Salah satu kemampuan komunikasi untuk membangun komunikasi yang beradab dan bermartabat adalah memanfaatkan kesantunan berbahasa terhadap lawan berbicara. Dengan kesantunan lawan bicara akan merasa ditempatkan pada posisi atau statusnya dengan tepat (Eelen, 2001:13).

Kesantunan dapat ditunjukkan tidak hanya dalam bentuk tindakan, tetapi juga dalam bentuk tuturan. Misalnya dalam berbahasa (tuturan) “Silakan masuk” lebih sopan daripada tuturan “Masuk!”. Penggunaan bahasa yang lemah lembut, sopan, santun, sistematis, teratur, jelas dan lugas mencerminkan pribadi penuturnya berbudi.

Kesantunan berbahasa Indonesia merupakan realitas komunikasi bahasa yang terikat norma sosial dan budayanya. Selain itu dapat menunjukkan identitas sosial bahkan budaya pemakainya (Brown dan Yule, 1996). Norma sosial dan budaya suatu masyarakat senantiasa berubah seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Perubahan tersebut tampak dalam kesantunan berbahasa para anggota DPR yang diberitakan sejumlah media massa. Misalnya apakah penggunaan bahasa (pidato) Anas

Urbaninrum (Ketua Partai Demokrat dan mantan anggota DPR RI) ketika mengundurkan diri akhir Februari 2013 karena menjadi tersangka hukum dapat dikategorikan santun atau sadis. Ruhut Sitompul (Anggota DPR RI) sering menjadi sorotan dan bahan tertawaan para pemirsa karena kevulgarannya yang cenderung menyerang pribadi lawan bicaranya di muka umum. Begitu pula anggota DPR RI lainnya ketika berbahasa baik di legeslatif maupun ketika tampil di media massa hakikatnya kurang dapat memberi contoh yang baik.

Dalam konteks negara demokrasi terjadinya perdebatan “panas” di dalam gedung DPR/MPR serta DPRD, sesungguhnya merupakan sesuatu yang sah dan wajar. Terlebih jika substansinya menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, maka perdebatan yang panas semacam itu merupakan sebuah keharusan. Namun dalam banyak kasus, terjadinya berbagai perdebatan panas tersebut bukan karena persoalan substansi, tetapi lebih dikarenakan akibat mereka tidak tertib dalam menggunakan bahasa serta kurang piawai dalam beretorika.

Sebagai makhluk sosial, anggota Legeslatif senantiasa mengekspresikan tuturannya berdasarkan tujuan individu dan sosial untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Penyampaian tujuan-tujuan itu juga dipengaruhi oleh faktor sosial dalam pemilihan dan penggunaan bahasa yang terwujud dalam bentuk, dan strategi tindak tutur mereka.

Dalam tindak ilokusi, tindak direktif merupakan kategori yang menjadi pusat perhatian di antara tindak tutur lainnya. Hal itu disebabkan karena tindak direktif merupakan salah satu tindak bahasa yang relasi antara bahasa (aspek linguistik) dan konteks penggunaannya paling intens dan kompleks serta bersaing dengan tujuan sosial. Berikut anggota DPR yang mengekspresikan tuturan yang mengembang ketidaksantunan dalam tindak direktif sebagai berikut.

“Selama ini, pemerintah cenderung bersikap santai saja dan membiarkan hidup masyarakat makin sulit. Setiap harga minyak dunia naik, pemerintah pun menaikkan BBM (anggota Fraksi PDI). Ini merupakan kegagalan dari pemerintahan SBY. Dulu, saat kenaikan harga BBM tahun 2013 berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Berarti dia mengingkari janjinya sendiri. Presiden sudah melakukan kebohongan politik, dan layak di-impeach.”

Tuturan tersebut merupakan tindak direktif anggota DPR RI berupa kritikan terhadap pemerintahan SBY. Namun, sesungguhnya tuturan anggota DPR RI tersebut bukan semata-mata dimaksudkan untuk memberitahukan, namun tuturan tersebut menghendaki pemerintahan SBY tidak menaikkan harga BBM.

Tindak tutur direktif tersebut terkesan sangat keras dan intinya memojokkan mitra tutur. Kata-kata keras dan kasar, seperti “Ini merupakan kegagalan dari pemerintahan SBY”, “dia mengingkari janjinya sendiri”, “Presiden sudah melakukan kebohongan politik, dan layak diimpeach”. Tuturan dengan kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa penutur berbicara dengan nada marah, rasa jengkel, dan memojokkan mitra tutur.

Mengamati penggunaan bahasa anggota DPR RI yang berlatar belakang sosial budaya yang berbeda-beda, pemerhati tertarik mengetahui apakah kesantunan tindak tutur direktif berbahasa Indonesia anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masih sesuai norma sosial budayanya. Norma sosial budaya yang merupakan konteks penggunaan tuturan dijiwai oleh aturan-aturan adat masyarakat tutur Makassar disebut *Panggadakkang* (tata krama). Dengan *Panggadakkang* itu, seseorang bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata dengan baik dan santun terhadap sesamanya dan terhadap pranata sosial secara timbal-balik.

Secara khusus tulisan ini difokuskan pengajiannya pada Salah satu kemampuan komunikasi untuk membangun komunikasi yang beradab dan bermartabat adalah memanfaatkan kesantunan berbahasa terhadap lawan berbicara. Dengan kesantunan lawan

bicara akan merasa ditempatkan pada posisi atau statusnya dengan tepat (Eelen, 2001:13).

Kesantunan dapat ditunjukkan tidak hanya dalam bentuk tindakan, tetapi juga dalam bentuk tuturan. Misalnya dalam berbahasa (tuturan) “Silakan masuk” lebih sopan daripada tuturan “Masuk!”. Penggunaan bahasa yang lemah lembut, sopan, santun, sistematis, teratur, jelas dan lugas mencerminkan pribadi penuturnya berbudi.

Kesantunan berbahasa Indonesia merupakan realitas komunikasi bahasa yang terikat norma sosial dan budayanya. Selain itu dapat menunjukkan identitas sosial bahkan budaya pemakainya (Brown dan Yule, 1996). Norma sosial dan budaya suatu masyarakat senantiasa berubah seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Perubahan tersebut tampak dalam kesantunan berbahasa para anggota DPR yang diberitakan sejumlah media massa. Misalnya apakah penggunaan bahasa (pidato) Anas Urbaninrum (Ketua Partai Demokrat dan mantan anggota DPR RI) ketika mengundurkan diri akhir Februari 2013 karena menjadi tersangka hukum dapat dikategorikan santun atau sadis. Ruhut Sitompul (Anggota DPR RI) sering menjadi sorotan dan bahan tertawaan para pemirsa karena kevulgarannya yang cenderung menyerang pribadi lawan bicaranya di muka umum. Begitu pula anggota DPR RI lainnya ketika berbahasa baik di legeslatif maupun ketika tampil di media massa hakikatnya kurang dapat memberi contoh yang baik.

Dalam konteks negara demokrasi terjadinya perdebatan “panas” di dalam gedung DPR/MPR serta DPRD, sesungguhnya merupakan sesuatu yang sah dan wajar. Terlebih jika substansinya menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, maka perdebatan yang panas semacam itu merupakan sebuah keharusan. Namun dalam banyak kasus, terjadinya berbagai perdebatan panas tersebut bukan karena persoalan substansi, tetapi lebih dikarenakan akibat mereka

tidak tertib dalam menggunakan bahasa serta kurang piawai dalam beretorika.

Sebagai makhluk sosial, anggota Legeslatif senantiasa mengekspresikan tuturannya berdasarkan tujuan individu dan sosial untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Penyampaian tujuan-tujuan itu juga dipengaruhi oleh faktor sosial dalam pemilihan dan penggunaan bahasa yang terwujud dalam bentuk, dan strategi tindak tutur mereka.

Dalam tindak ilokusi, tindak direktif merupakan kategori yang menjadi pusat perhatian di antara tindak tutur lainnya. Hal itu disebabkan karena tindak direktif merupakan salah satu tindak bahasa yang relasi antara bahasa (aspek linguistik) dan konteks penggunaannya paling intens dan kompleks serta bersaing dengan tujuan sosial. Berikut anggota DPR yang mengekspresikan tuturan yang mengembang ketidaksantunan dalam tindak direktif sebagai berikut.

“Selama ini, pemerintah cenderung bersikap santai saja dan membiarkan hidup masyarakat makin sulit. Setiap harga minyak dunia naik, pemerintah pun menaikkan BBM (anggota Fraksi PDI). Ini merupakan kegagalan dari pemerintahan SBY. Dulu, saat kenaikan harga BBM tahun 2013 berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Berarti dia mengingkari janjinya sendiri. Presiden sudah melakukan kebohongan politik, dan layak di-impeach.”

Tuturan tersebut merupakan tindak direktif anggota DPR RI berupa kritikan terhadap pemerintahan SBY. Namun, sesungguhnya tuturan anggota DPR RI tersebut bukan semata-mata dimaksudkan untuk memberitahukan, namun tuturan tersebut menghendaki pemerintahan SBY tidak menaikkan harga BBM.

Tindak tutur direktif tersebut terkesan sangat keras dan intinya memojokkan mitra tutur. Kata-kata keras dan kasar, seperti “Ini merupakan kegagalan dari pemerintahan SBY”, “dia mengingkari janjinya sendiri”, “Presiden sudah melakukan kebohongan politik,

dan layak diimpeach”. Tuturan dengan kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa penutur berbicara dengan nada marah, rasa jengkel, dan memojokkan mitra tutur.

Mengamati penggunaan bahasa anggota DPR RI yang berlatar belakang sosial budaya yang berbeda-beda, pemateri tertarik mengetahui apakah kesantunan tindak tutur direktif berbahasa Indonesia anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masih sesuai norma sosial budayanya. Norma sosial budaya yang merupakan konteks penggunaan tuturan dijiwai oleh aturan-aturan adat masyarakat tutur Makassar disebut *Panggadakkang* (tata krama). Dengan *Panggadakkang* itu, seseorang bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata dengan baik dan santun terhadap sesamanya dan terhadap pranata sosial secara timbal-balik.

Secara khusus tulisan ini mengkaji bentuk dalam kesantunan honorifik berbahasa dalam perspektif teori tindak tutur, pragmatik, sosiolinguistik.

Bentuk deklaratif yang mengemban kesantunan honorifik (KH) pada umumnya menggunakan BI dengan alternatif bentuk sapaan berupa (1) istilah kekerabatan, (2) kata ganti, dan (3) nama jabatan. Bentuk interogatif yang mengembang KH hanya (1) istilah kekerabatan dan, (2) kata ganti. Alternatif bentuk sapaan tersebut ada kalanya dikombinasikan dengan alternatif bentuk sapaan yang lain. Keberadaan bentuk deklaratif dan interogatif, serta imperative yang mengemban KH dalam tindak direktif berwujud tuturan permintaan klarifikasi dan permintaan tindakan.

Kesantunan honorifik dalam tindak tutur deklaratif dan interogatif untuk meminta, memerintah atau melarang yang dituturkan anggota DPRD pada umumnya didahului atau diikuti oleh fakta-fakta, penjelasan, disertai sapaan honorifik, dan menggunakan strategi langsung. Sedangkan dalam tindak tutur interogatif menggunakan strategi tidak langsung. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kualitas, cara, dan relevansi (Grice, 1978). Penggunaan alternatif honorific tersebut dipengaruhi konteks penggunaannya

termasuk norma sosial budaya masyarakat Makassar. Gu dalam Eelen, (2001) menyatakan secara eksplisit kesantunan dihubungkan dengan norma-norma moral kemasyarakatan.

Penggunaan honorific dalam tindak direktif modus deklaratif umumnya menggunakan alternatif sapaan kekerabatan *Bu* dan *Pak*. Kedua sapaan tersebut lazim digunakan anggota DPRD kepada mitra tuturnya dengan beberapa pertimbangan seperti perbedaan usia, kedudukan mitra tutur dalam pemerintahan, dan kebiasaan bertutur dalam suasana formal. Dalam Gu (1990) maksim sapaan berbunyi sapaalah lawan bicara Anda dengan sapaan yang sesuai terhadap status sosialnya, peran pendengar, dan hubungan antar penutur dan mitra tutur.

Selain sapaan kekerabatan, digunakan pula alternatif kata ganti orang seperti *kami*, *kita* (sebagai kata ganti orang kedua tunggal), *serta kita* (sebagai kata ganti orang kedua tunggal). Kata ganti “kami (jamak)” digunakan untuk menggantikan kata ganti “saya” baik dalam meminta klarifikasi maupun meminta tindakan. Kata ganti “kami” sebagai bentuk merendahkan diri untuk penghormatan terhadap lawan tutur. (Leech, 1983:205-207). Kata ganti “kami” lebih halus daripada kata ganti “saya” yang terkesan arogan. Dikatakan demikian karena anggota dewan tidak semata memandangi diri sebagai individu tetapi pada saat yang sama juga mewakili temannya dalam komisi, fraksi, atau korps anggota dewan ketika berhadapan dengan eksekutif atau pihak lain yang diundang dalam rapat dewan. Selanjutnya untuk penggunaan honorific nama jabatan seperti *Pak* ketua, yang mewakili Dinas dimaksudkan sebagai penghormatan terhadap kedudukan.

Adapun kata ganti “kita” sebagai kata ganti pertama jamak digunakan untuk mengganti kata “saya” baik dalam meminta klarifikasi atau meminta tindakan. Penggunaan kata ganti “kita” secara pragmatis mengimplikasikan adanya kebersamaan dengan lawan tutur atau pihak diluar anggota dewan. Lawan tutur merasa dihormati sehingga walaupun isi tuturan terkesan menekan. Hal

tersebut disebabkan bentuk interogatif dan kata ganti sapaan (honorifik) sehingga tetap menunjukkan adanya santun. Berbeda dengan kata ganti “kita” dalam bahasa Makassar yang berarti orang kedua tunggal. Kata ganti tersebut sama kedudukannya dengan *Anda*, *Kamu*, *Kau*. Namun, kata ganti “kita” terasa lebih dekat, menunjukkan hubungan asimetri dengan lawan tutur, umur yang lebih tua, status atau kedudukan yang lebih tinggi sehingga lebih santun daripada kata ganti *Anda*, *kamu*, dan *kau*. Dalam Leech, (1983) bahwa tuturan yang mengutungkan mitra tutur seperti disampaikan bawahan terhadap atasan.

Ketiga alternatif sapaan (kekerabatan dan kata ganti orang) dalam deklaratif digunakan secara bergantian untuk melemahkan fungsi-fungsi dalam tindak direktif sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis. Sedangkan Kedua alternatif honorifik (istilah kekerabatan dan kata ganti) dalam tuturan interogatif digunakan secara bergantian untuk melemahkan fungsi-fungsi dalam tindak direktif sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa penggunaan modus interogatif dalam tindak tutur meminta klarifikasi dan tindakan walaupun terasa menekan lawan tutur namun, dengan berbagai strategi bertutur dan penanda kesantunan tersebut di atas masih tetap santun atau normatif. Hal tersebut sejalan dengan Leech, (1983) yakni menguntungkan lawan tutur atau Goffman, 1973 yakni tidak mengancam nosi muka lawan tutur, atau agar menunjukkan penghormatan terhadap lawan tutur (Holmes, 2000). Bentuk KH tersebut berorientasi kepada solidaritas tinggi dan berasosiasi dengan posisi kehormatan Pn yang lebih tinggi dari pada Mt. Bentuk KH yang dinyatakan anggota dewan lazimnya jika berkaitan dengan hal-hal yang mendesak sehingga dipandang penting oleh lawan tutur agar ada tindakan-tindakan penyelesaian atau perbaikan. Oleh karena itu, penggunaan alternatif honorifik disertai dengan struktur teks sangat menentukan untuk tidak mengancam muka mitra tutur. Mengingat bahwa tindak direktif meminta klarifikasi dan meminta

tindakan dari anggota DPRD merupakan amanah yang harus ditunjukkan dalam sikap kritis, jujur, adil dan professional sebagai wakil rakyat.

Keharmonisan dalam tindak tutur anggota DPRD senantiasa dicapai dengan mempertimbangkan penggunaan alternatif honorifik sesuai tujuan tutur dan lawan tutur. Penggunaan alternatif honorifik itu dapat mencerminkan penuturnya bersikap rendah hati, simpati, menunjukkan pujian serta kebersamaan. Sikap-sikap tersebut sejalan dengan prinsip kesantunan (Leech, 1983:205-207). Selain itu dapat menunjukkan skala jarak social, skala status, skala formalitas (Holmes, 2001). Dengan demikian, penggunaan alternatif honorifik dan dalam tindak direktif dapat menguntungkan mitra tutur sehingga tampak disampaikan dari bawahan terhadap atasan. Selain alternative honorific, penutur (anggota DPRD) tampak berbicara dengan akal sehat, mengedepankan pokok masalah (spontan) pertanda bahwa penutur langsung terbuka. Dalam budaya Makassar hal tersebut dapat berarti lambang kejujuran.

Selanjutnya temuan penelitian dalam tuturan imperatif anggota DPRD menggunakan BI dengan alternatif honorifik bervariasi terkait dengan fungsi yang direpresentasikannya yakni tindak meminta dan memerintah. Tindak meminta dinyatakan dengan berbagai honorific dan penanda linguistic lainnya sehingga terkesan lebih santun daripada tindak memerintah yang terkesan tegas. Tindak meminta anggota dewan lazimnya berkaitan dengan hal-hal yang dianggap belum jelas sehingga diperlukan adanya jawaban dari pihak eksekutif yang bersifat klarifikasi. Sedangkan tindak meminta tindakan (memerintah atau melarang) lazim digunakan jika berkaitan dengan hal-hal yang penting dan sudah jelas pokok permasalahannya. Berdasarkan kejelasan dan ketidakjelasan permasalahan, maka tindak tutur imperative klarifikasi dan tindakan yang dinyatakan anggota DPRD berdasarkan data. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kualitas (Grice, 1978).

Bentuk KH anggota dewan dalam tuturan imperatif permintaan klarifikasi umumnya menggunakan urutan tutur berupa pengantar, dan isi, serta penegasan. Dengan pola urutan tersebut terkesan santun seperti disampaikan dari bawahan terhadap atasan (asimetris) seperti pada [5a]. Sedangkan tuturan pada [30a dan 37 a] urutan tuturnya berupa isi dan penegasan sehingga menunjukkan hubungan simetris atau sesama teman sehingga cenderung agak tegas. Namun, dengan adanya modalitas *tolong* [30a] dan *saya kira* [37 b] serta, berbagai alternative sapaan honorific seperti *Pak kadis* [30a dan 37a] maka, ketegasan tuturan anggota DPRD tergolong wajar sesuai norma social budaya masyarakat setempat.

Bentuk KH anggota dewan dalam tuturan imperatif permintaan tindakan umumnya menggunakan pola urutan tutur berupa isi dan penegasan sehingga tampak langsung kepokok pembicaraan. Dengan demikian, tuturan anggota DPRD menunjukkan hubungan asimetris yakni dari atasan terhadap bawahan. Selain itu anggota dewan sering menggunakan kata ganti *saya* yang seharusnya menggunakan kata ganti *kami* dalam posisinya sebagai wakil rakyat atau lembaga legislatif. Dengan pilihan kata tersebut menunjukkan keangkuhan. Berdasarkan beberapa indicator tersebut, maka tuturan anggota DPRD terkesan tegas. Namun, dengan tujuan tutur anggota dewan, dan tugas yang diemban sebagai wakil rakyat atau badan pengawas dan didasari niat yang baik maka tuturan imperatif perintah tersebut tergolong wajar tetap santun sesuai norma sosial budaya masyarakat Makassar.

Ringkasan:

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, kesantunan berbahasa di rapat dewan diasumsikan terkait dengan dua faktor yang secara dinamis tarik menarik di antara kedua lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah, yakni faktor kemitrasejajaran di satu sisi dan fungsi DPRD mengawasi jalannya pembangunan di sisi lain. Di sana juga telah dinyatakan bahwa faktor kemitrasejajaran

mempersyaratkan kerjasama sementara faktor pengawasan mempersyaratkan ketegasan sehingga dapat bersaing dengan tujuan sosial. Dengan demikian kesantunan berbahasa di dalam rapat dewan diasumsikan sebagai upaya anggota legeslatif untuk menjaga keseimbangan dalam mengimplementasikan kedua faktor tersebut. Temuan penelitian membuktikan kebenaran asumsi ini. Hal ini terbukti dari terdapatnya sejumlah tuturan di rapat dewan yang bersifat langsung dan lugas tapi wajar sebagai representasi dari faktor kedudukan dan terdapat pula sejumlah tuturan yang secara signifikan mengisyaratkan kerjasama yang direalisasikan oleh tuturan tidak langsung. Faktor kedudukan yang menghendaki ketegasan direalisasikan dengan strategi penyampaian dan, pemarkah kesantunan, serta perujuk diri. Faktor kemitraandirealisasi dengan strategi, pronomina, kata/frasa. Perilaku langsung, lugas (normatif) di rapat dewan adalah perilaku yang wajar dan berterima. Perilaku santun di rapat dewan adalah perilaku yang melebihi kelaziman dan keberterimaan untuk mencapai kesantunan. Realisasi perilaku normatif di rapat dewan adalah penggunaan tuturan-tuturan yang mengikat secara sosial (*socially-stricted language*) dan tuturan-tuturan yang bersifat formulaik. Realisasi perilaku santun di rapat dewan adalah penggunaan tuturan-tuturan yang secara strategis dipilih individu (*strategically chosen by individual*) sehingga bersifat semi-formulaik atau sesuai norma sosial budaya masyarakat setempat. Realisasi perilaku normatif di rapat dewan adalah: 1) Penggunaan modus interogatif dan imperatif untuk meminta penjelasan; 2) Penggunaan pronomina 'kami' untuk menggantikan pronomina 'saya' agar santun; 3) Penggunaan modalitas 'tolong' dan 'mohon' sebagai penanda kesantunan yang secara formulaik digunakan di dalam tuturan-tuturan di dalam rapat resmi pada umumnya; dan 4) Penggunaan perujuk diri ('menurut saya').

Ditemukan pula perilaku santun di rapat dewan baik dalam tingkat wacana maupun frasa/leksikal. Pada tingkat wacana,

kedudukan anggota dewan menggunakan pronomina yakni dengan menggabungkan kelompok dalam (legeslatif) dengan kelompok luar (eksekutif). Salah satu contohnya adalah penggunaan pronomina 'kita' untuk menggantikan pronomina 'saudara.' Secara pragmatik, isyarat yang dikirimkan melalui penggunaan pronomina 'kita' untuk menggantikan pronomina 'saya' diinterpretasi sebagai upaya strategik individu untuk mengupayakan kesantunan melalui penegasan kedudukan kemitraan kedua lembaga. Juga pada tingkat wacana, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, anggota legeslatif secara strategik menggunakan tuturan tidak langsung melalui strategi penyampaiannya. Anggota legeslatif misalnya menggunakan modus interogatif dalam mengemukakan pendapat yang berbeda. Secara pragmatik, hal ini bermakna bahwa anggota legeslatif tidak memaksakan pendapat terhadap lawan tutur.

Di tingkat frasa dan leksikal, anggota legeslatif menggunakan kata berpagar dan penurun untuk memodulasi tuturan. Keduanya digunakan secara internal yakni dengan melunakkan dampak frasa dan leksikal yang langsung mengikutinya. Sebagai contoh, anggota legeslatif menggunakan leksikal 'kurang' pada frasa 'kurang jelas' walau sesungguhnya yang dimaksudkan adalah 'tidak jelas'. Demikian juga leksikal 'masih' digunakan pada frasa 'masih dipertimbangkan' walau sesungguhnya yang dimaksudkan adalah 'tidak disetujui'. Anggota legeslatif juga seolah-olah memberi pilihan kepada lawan tutur bahwa permintaan akan penjelasan dapat dipenuhi atau dapat juga tidak dipenuhi lawan tutur walau dalam struktur persidangan yang berterima jelas bahwa permintaan akan penjelasan wajib dipenuhi petutur. Isyarat dimaksud disampaikan melalui penggunaan kata berpagar 'mungkin' misalnya pada 'Mungkin bisa nanti dijelaskan kepada kami...'

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat wacana, kesantunan berbahasa di rapat dewan terutama direalisasikan dalam elemen linguistik dan strategi bertutur. Dalam merealisasikan kedudukan kemitraan, anggota legeslatif memberdayakan elemen

linguistik pronomina. Sedangkan dalam merealisasikan fungsi pengawasan, anggota dewan menggunakan strategi penyampaian tindak tutur tidak langsung. Sementara pada tingkat frasa, anggota legislatif menggunakan elemen linguistik kata berpagar dan penurunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa tidak semua tuturan yang dikemukakan di dalam rapat dewan bersifat lugas dan langsung. Berbicara lugas dan langsung kepada substansi persoalan di rapat dewan merupakan refleksi dari sikap kritis, adil, profesional, dan proporsional yang diamanatkan kode etik DPRD. Selain itu, berbicara lugas dan langsung juga didorong adanya kebutuhan untuk mengutamakan efisiensi dalam berkomunikasi. Walaupun tuturan yang bersifat lugas dan langsung merupakan sesuatu hal yang dikategorikan sebagai perilaku wajar di dalam rapat dewan namun, penelitian ini menunjukkan bahwa anggota legislatif tetap berupaya untuk mencapai perilaku santun.

Kesantunan berbahasa di rapat dewan terkait dengan dua faktor yakni faktor simetris atau kesejajaran anggota legislative dengan pihak eksekutif atau lawan bicarawan dan faktor pengawasan. Kedua faktor ini diseimbangkan melalui kesantunan berbahasa. Dengan demikian fungsi kesantunan berbahasa di rapat dewan adalah menjaga keseimbangan dalam mengimplementasikan faktor simetris (kemitraan) yang mempersyaratkan kolaborasi dan kooperasi dan faktor pengawasan yang mempersyaratkan distansi dan kompetisi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kesantunan berbahasa bagi anggota legislative memaksimalkan pilihan kata dan penggunaan strategi berbahasa untuk memenuhi kedudukan simetrik (kemitraan) dan pengawasan (asimetrik).

Kesantunan berbahasa di dalam rapat dewan ditandai dengan sifat ketidaklangsungan tuturan. Tuturan tidak langsung adalah tuturan yang berbeda dengan modus kalimatnya dan disesuaikan dengan konteks yang mengikutinya. Misalnya, kalimat berita yang seharusnya berfungsi untuk memberitakan sesuatu dapat

digunakan untuk meminta atau menyuruh. Begitu juga kalimat tanya yang seharusnya berfungsi untuk menanyakan sesuatu dapat digunakan untuk meminta atau menyuruh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaklangsungan tuturan dalam rapat dewan diungkapkan dalam strategi penyampaianya. Dalam tindak tutur meminta penjelasan, tuturan tidak langsung direalisasikan modus deklaratif dan imperatif.

Kesantunan berbahasa dengan penggunaan pronomina dicapai dengan cara memodifikasi pelibatan penutur-petutur untuk mencapai tujuan komunikasi. Di dalam rapat dewan, anggota legeslatif memodifikasi tuturannya dengan cara memodifikasi: a) 'saya' menjadi 'kita'; b) 'kami' menjadi 'kita'; dan c) 'saudara' menjadi 'kita'. Hal tersebut berarti bahwa yang dilakukan penutur adalah memodifikasi pelibatan penutur-petutur sehingga terjadi hubungan harmonis antar penutur dan lawan tutur.

Penggunaan pronomina dalam rapat dewan sesungguhnya mencerminkan bagaimana anggota legeslatif melihat dirinya dalam hubungan sosialnya dengan orang lain. Penggunaan 'kita' untuk menggantikan 'saya,'kami' atau 'saudara' mengisyaratkan adanya hubungan kesejajaran atau kemitraan 'kita'. Demikian juga, penggunaan 'kita' menggantikan kata 'saya,' kami', bahkan 'saudara' menggambarkan kebersamaan yang dianut di dalam ranah rapat dewan.

Dengan pilihan kata yang tepat dan penggunaan strategi penyampaian tuturan di atas, dapat dikatakan bahwa cara yang ditempuh anggota DPRD dalam mencapai kesantunan berbahasa adalah dengan memperkuat hubungan kemitraan dan melemahkan fungsi pengawasan. Memperkuat hubungan kemitraan dilakukan dengan pemberdayaan pronomina 'kita' sedangkan melemahkan fungsi pengawasan dilakukan dengan pemberdayaan tuturantidak langsung, pilihan kata.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa di rapat dewan ditemukan tuturan yang wajar sebagai bentuk realisasiasi perilaku

normatif. Penggunaan tuturan interogatif dan imperatif dalam tindak tutur meminta penjelasan dan penggunaan modus deklaratif dalam tindak tutur memberikan pendapat merupakan realisasi dari perilaku normatif tersebut. Selain itu, penggunaan perujuk diri dan pemarkah kesantunan juga merupakan realisasi dari perilaku normatif karena tidak memberikan dampak terhadap lunaknya tuturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Cipto, 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Brown, Penelope dan Stephen C. Levinson. 1998. *Politeness Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta
- Christie, Chris. (2005). *Politeness and the Linguistics Construction of Gender in Parliament: An Analysis of Transgressions and Apology Behaviour*. Working Papers on the Web.
- Cipto, Bambang, Drs, MBA. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cohen, A.D. (1996). 'Speech acts'. Dalam N. H. Hornberger & S. L. McKay. *Sociolinguistics and Language Teaching*. Cambridge: CUP
- Comrie, B. (1984). *Russian*. In W. S. Chisholm Jr. (Ed.), *Interrogativity a colloquium on the grammar, typology and pragmatics of questions in seven diverse languages* (TSL Volume 4 ed., pp. 7-46). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Chris Christie, *Politeness and the Linguistics Construction of Gender in Parliament: An Analysis of Transgressions and Apology Behaviour*. Working Papers on the Web., (2005).

- Christine Drake, *National Integration in Indonesia*. Ethnic and Religious Conflict in Indonesia: a Crisis of Nationhood? (Washington DC: The Woodrow Wilson International Center Asia Program, 1999), p. 5.
- Eelen, Gino. 2001. *A Critique of Politeness Theories*. Manchester: Jerome Publishing.
- Eric M. Uslaner, *The Decline of Comity in Congress* (Ann Arbor: The University of Michigan, 1993).
- Esther N. Goody, (ed.).1978. *Questions and Politeness : Strategies in social interaction* Cambridge: Cambridge University Press.
- Goffman, E.1973. *Language and Social Context*. Australia: Penguin Education.
- Grice, H.P. 1975. Logic and Conversation. *Syntax and Semantics, Speech Act*, 3, New York: Academic Press.
- Hadiati, Sri, SH, MBA, dkk. 2005. *Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara.
- Holmes, J. 2001. *An Introduction to Sociolinguistics*. Harlow: Person Education.
- Hymes, Dell. 1974. *Foundation in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*. Philadelphia: University of Pennsylvan Press, Inc.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kompas, 2003. *Kesantunan Berbahasa Cenderung Turun*. (<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0307/28/dikbud/456905.htm>)
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 119
- Lakoff, R. (1973). *The Logic of Politeness: Minding Your P's and Q's*

- Lakoff, Robin Tolmach. 1990. *“Talking About Language”*. *Talking Power*. USA:
Basic Book
- Leech, G. N. (1983). *Principles of pragmatics*. London ; New York: Longman.
- Levinson, Penelope Brown dan Stephen C. Levinson 1992. *“Universals in Language Usage: Politeness Phenomena”*. *Questions and Politeness Strategies in Social Interaction*. Esther N. Goody (ed) Cambridge: Cambridge University Press.
- Locher, M. A. (2004). *Power and politeness in action : Disagreements in oral communication*. Berlin ; New York: M. de Gruyter.
- Malmkjer, K. (2006). *The Linguistics Encyclopedia*. London: Routledge
- Manurung, Ria. 2000. *Keberadaan partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Persepsi Mahasiswa Kotamadya Medan terhadap Kehidupan Politik*. Medan: Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara
- Novianti, E. (2008). ‘Tindak tutur direktif dalam bahasa Melayu dialek Sambas. *Tesis*. Universitas Diponegoro’.
- Pikiran Rakyat, 2005 (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/18/02.htm>)
- Pranowo (2009). *Berbahasa Secara Santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pratiwi, D.N. (2012). ‘Penerapan Tindak tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi Ustad Nur Maulana Pada Tayangan Islam Itu Indah Di Trans TV’, *Skriptorium*, Vol. 1, No. 1, diakses melalui Tindak tutur://journal.unair.ac.id/detail_jurnal.php?id=4345&med=45&bid=45
- Rahardi, K. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga

- Ria Manurung, *Keberadaan partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Persepsi Mahasiswa Kotamadya Medan terhadap Kehidupan Politik*. (Medan: Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, 2000.), p.35-35.
- Richard J. Watts, *Politeness. Key topics in sociolinguistics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 20-21.
- Robert Sibarani, *Kesantunan Bahasa. Antropolinguistik* (Medan: Penerbit Poda, 2004), p. 169.
- Sauri, Dr. H. Sofyan. 2004. *Ingin Mabrur Berbicaralah dengan Santun*. Gema Haji
2004/2005. Pikiran Rakyat Cyber Media.
- Sara Mills, *Gender and Politeness* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p.9.
- Sibarani, Robert. (2004). *Kesantunan Bahasa. Antropolinguistik*. Medan: Penerbit Poda.
- Searle, J. R.2001.*Indirect Speech Acts*. Dalam A.P. Martinich (Ed.). *The Philosophy of Language*. Oxford: Oxford University Press.
- Sumarsono dan Partana, Paina. 2002. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda.
- Sri Hadiati, , SH, MBA, dkk. *Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara, 2005), p. 2.
- Uslaner, Eric M. 1993. *The Decline of Comity in Congress*. Ann Arbor: The University of Michigan.
- Watts, Richard J. 2003. *Politeness. Key topics in sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Watts, Richard J. 2005a. "Linguistic politeness research: Quo Vadis?" *Politeness in Language*. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). New York: Mouton de Gruyter.
- Watts, Richard J. 2005b. "Linguistic politeness and politic verbal behaviour: Reconsidering claims for universality" *Politeness in Language*. Richard Watts,
- Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). New York: Mouton de Gruyter.
- Watts, Richard J., Sachiko Ide, dan Konrad Ehlich. 2005. "Introduction" *Politeness in Language*. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). New York: Mouton de Gruyter.
- Wardhaugh, R. (2006). *An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Blackwell Publishing
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Bambang, Cipto, 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Brown, Penelope dan Stephen C. Levinson. 1998. *Politeness Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chaer,A.(2010).*KesantunanBerbahasa*.Jakarta:RinekaCipta
- Christie, Chris. (2005). *Politeness and the Linguistics Construction of Gender in Parliament: An Analysis of Transgressions and Apology Behaviour*. Working Papers on the Web.
- Cipto, Bambang, Drs, MBA. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cohen,A.D.(1996). 'Speechacts'.DalamN.H.Hornberger&S.L.McKay. *SociolinguisticsandLanguageTeaching*. Cambridge:CUP

- Comrie, B. (1984). Russian. In W. S. Chisholm Jr. (Ed.), *Interrogativity a colloquium on the grammar, typology and pragmatics of questions in seven diverse languages* (TSL Volume 4 ed., pp. 7-46). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Chris Christie, *Politeness and the Linguistics Construction of Gender in Parliament: An Analysis of Transgressions and Apology Behaviour*. Working Papers on the Web., (2005).
- Christine Drake, *National Integration in Indonesia. Ethnic and Religious Conflict in Indonesia: a Crisis of Nationhood?* (Washington DC: The Woodrow Wilson International Center Asia Program, 1999), p. 5.
- Eelen, Gino. 2001. *A Critique of Politeness Theories*. Manchester: Jerome Publishing.
- Eric M. Uslaner, *The Decline of Comity in Congress* (Ann Arbor: The University of Michigan, 1993).
- Esther N. Goody, (ed.).1978. *Questions and Politeness : Strategies in social interaction* Cambridge: Cambridge University Press.
- Goffman, E.1973. *Language and Social Context*. Australia: Penguin Education.
- Grice, H.P. 1975. *Logic and Conversation. Syntax and Semantics, Speech Act, 3*, New York: Academic Press.
- Hadiati, Sri, SH, MBA, dkk. 2005. *Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara.
- Holmes, J. 2001. *An Introduction to Sociolinguistics*. Harlow: Person Education.
- Hymes, Dell. 1974. *Foundation in Sociolinguistics: An Etnographic Approach*. Philadelphia: University of Pennsylvan Press, Inc.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kompas, 2003. Kesantunan Berbahasa Cenderung Turun. (<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0307/28/dikbud/456905.htm>)
- Kridalaksana, H. (2008). Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 119
- Lakoff, R. (1973). The Logic of Politeness: Minding Your P's and Q's
- Lakoff, Robin Tolmach. 1990. "Talking About Language". Talking Power. USA: Basic Book
- Leech, G. N. (1983). Principles of pragmatics. London ; New York: Longman.
- Levinson, Penelope Brown dan Stephen C. Levinson 1992. "Universals in Language Usage: Politeness Phenomena". Questions and Politeness Strategies in Social Interaction. Esther N. Goody (ed) Cambridge: Cambridge University Press.
- Locher, M. A. (2004). Power and politeness in action : Disagreements in oral communication. Berlin ; New York: M. de Gruyter.
- Malmkjer, K. (2006). The Linguistics Encyclopedia. London: Routledge
- Manurung, Ria. 2000. Keberadaan partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Persepsi Mahasiswa Kotamadya Medan terhadap Kehidupan Politik. Medan: Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara
- Nababan, PWJ. (1984). Sosiolinguistik: suatu pengantar. Jakarta. Gramedia
- Novianti, E. (2008). 'Tindakan tutur direktif dalam bahasa Melayu dialek Sambas. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Pikiran Rakyat, 2005 (<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0305/18/02.htm>)
- Pranowo (2009). Berbahasa Secara Santun. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Pratiwi, D.N. (2012). 'Penerapan Tindakan tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi Ustad Nur Maulana Pada Tayangan Islam Itu Indah Di Trans TV', *Skriptorium*, Vol. 1, No.1, diakses melalui [Tindakan tutur://journal.unair.ac.id/detail_jurnal.php?id=4345&med=45&bid=45](http://journal.unair.ac.id/detail_jurnal.php?id=4345&med=45&bid=45)
- Rahardi, K. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Ria Manurung, *Keberadaan partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Persepsi Mahasiswa Kotamadya Medan terhadap Kehidupan Politik*. (Medan: Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, 2000.), p.35-35.
- Richard J. Watts, *Politeness. Key topics in sociolinguistics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 20-21.
- Robert Sibarani, *Kesantunan Bahasa. Antropolinguistik* (Medan: Penerbit Poda, 2004), p. 169.
- Sauri, Dr. H. Sofyan. 2004. *Ingin Mabruur Berbicaralah dengan Santun*. Gema Haji
2004/2005. *Pikiran Rakyat Cyber Media*.
- Sara Mills, *Gender and Politeness* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p.9.
- Sibarani, Robert. (2004). *Kesantunan Bahasa. Antropolinguistik*. Medan: Penerbit Poda.
- Searle, J. R. 2001. *Indirect Speech Acts*. Dalam A.P. Martinich (Ed.). *The Philosophy of Language*. Oxford: Oxford University Press.
- Sumarsono dan Partana, Paina. 2002. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda.
- Sri Hadiati, SH, MBA, dkk. *Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara, 2005), p. 2.

- Uslaner, Eric M. 1993. *The Decline of Comity in Congress*. Ann Arbor: The University of Michigan.
- Watts, Richard J. 2003. *Politeness. Key topics in sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Watts, Richard J. 2005a. "Linguistic politeness research: Quo Vadis?" *Politeness in Language*. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). New York: Mouton de Gruyter.
- Watts, Richard J. 2005b. "Linguistic politeness and politic verbal behaviour: Reconsidering claims for universality" *Politeness in Language*. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). New York: Mouton de Gruyter.
- Watts, Richard J., Sachiko Ide, dan Konrad Ehlich. 2005. "Introduction" *Politeness in Language*. Richard Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (ed). New York: Mouton de Gruyter.
- Wardhaugh, R. (2006). *An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Blackwell Publishing
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset

TENTANG PENULIS



Dr. Syafruddin, M.Pd. lahir Sungguminasa/ 20 Maret 1964. Aktifi sebagai tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Makassar, jenjang pendidikannya adalah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, IKIP Ujung Pandang 1988. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Makassar 2000. S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Malang 2010.

Pengalaman di Bidang Penelitian *Stuktur Novel Perang Karya Putu Wijaya (Analisis Struktural) 2003, Karakter Pelaku Utama di Bawah Lindungan Ka'bah 2003, Analisis Nilai Roman 'Saman' Karya Utami 2006, Analisis Penokohan Novel "Tak Putus Dirundung Malang", Kesantunan Honorifik dalam Tindak tutur Direktif Keluarga Terpelajar Masyarakat Makassar 2010, Peningkatan Kompetensi Pedagogis Guru Sekolah Dasar Kabupaten Gowa dengan Model Student Center Learning Berbasis Keunggulan Lokal 2011. Kesantunan Tindak Tutur Direktif Anggota Legeslatif Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2016. Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia Berbasis Budaya Lokal Bagi Penutur Asing (BIPA) Melalui Computer Assisted Instruction (CAI) (2017).*

Sedangkan diktat/Bahan Ajar yang telah disusun adalah *Kritik Sastra 2010, Apresiasi Puisi 2010, Psikolinguistik 2010, Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 2011, Perencanaan*

Pembelajaran Bahasa Indonesia 2011, Kesantunan berbahasa Indonesia Masyarakat Makassar, 2015.

Alamat Jl. Malino No 143 Kel. Bontoramba Kab. Gowa, (0411) 888906/08133410480.